







LAPORAN KINERJA TRIMERIA





DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN



KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja (LKj) UPT Stasiun Pengawasan SDKP Tahuna merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban kinerja dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi serta target kinerja Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tahun 2025. Sebagaimana amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja



Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, Instansi Pemerintah serta bagian dari perwujudan transparansi dan akuntabilitas UPT Stasiun Pengawasan SDKP Tahuna dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam kaitannya dengan terselenggaranya *good governance*.

Laporan Kinerja (LKj) Triwulan I Tahun 2025 Stasiun Pengawasan SDKP Tahuna memberikan gambaran terhadap semua capaian kinerja dan aktivitas kegiatan yang telah menjadi target pada triwulan berjalan di tahun tersebut. Dalam Laporan Kinerja ini juga menjabarkan langkah-langkah tindak lanjut dalam rangka perbaikan capaian ke depansebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja Tahun 2025.

Laporan ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan saran dan masukan dalam rangka perbaikan laporan ini di masa yang akan datang. Kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah ikut berperan aktif dalam penyusunan sehingga laporan kinerja ini dapat disusun dan diterbitkan.

Akhir kata, semoga Laporan ini dapat menjadi media pertanggungjawaban kinerja sekaligus tolak ukur peningkatan kinerja bagi pegawai Stasiun PSDKP Tahuna dan seluruh pihak terkait. Semoga motivasi yang telah dibangun dalam membangun kinerja pengawasan SDKP dapat terus ditingkatkan.

Tahuna, 17 April 2025

Kepala Stasiun Pengawasan Sumber

Dava Kelautan dan Perikanan Tahuna,

Bayu Y Suharto, S.St.Pi,M.Si

NIP. 19850616 200701 1 003

RINGKASAN EKSEKUTIF

Menindaklanjuti Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, Instansi Pemerintah, maka disusun Laporan Kinerja (LKj) Triwulan I Tahun 2025 UPT Stasiun Pengawasan SDKP Tahuna. LKj ini merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas terhadap kinerja UPT Stasiun Pengawasan SDKP Tahuna yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja dan RKT tahun 2025.

Sebagaimana tercantum dalam dokumen Perjanjian Kinerja, untuk tahun 2025 terdapat 8 Sasaran Kegiatan dan 19 Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yang harus dilaksanakan oleh UPT Stasiun Pengawasan SDKP Tahuna sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap kinerja yang akan dilaksanakan. Dari 19 IKK tersebut telah terbagi menjadi 8 Indikator Kinerja Utama (IKU) dan 11 Indikator Kinerja Manajerial (IKM).

Hasil pengukuran capaian kinerja UPT Stasiun Pengawasan SDKP Tahuna Triwulan I Tahun 2025 diperoleh Nilai Pencapaian Sasaran Kegiatan sebesar 100,83% dengan predikat "Baik". Delapan SK tersebut antara lain: SK.1 Terselenggaranya Intelijen Kelautan dan Perikanan Secara Efektif, SK.2 Terselenggaranya Pengawasan Sumber Daya Kelautan, SK.3 Terselenggaranya Pengawasan Sumber Daya Perikanan, SK.4 Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP Secara Efektif, SK.5 Terselenggaranya Pembangunan Serta Perawatan Sarana dan Prasarana Pengawasan SDKP yang Sesuai Ketentuan, SK.6 Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran Administratif Bidang Kelautan dan Perikanan yang Efektif dan Sesuai Ketentuan, SK.7 Terselenggaranya Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang Efektif, Lincah dan Akuntabel dalam Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan .

Alokasi anggaran Stasiun Pengawasan SDKP Tahuna TA. 2025 sebesar Rp. 14.293.185.000,- dengan pagu Real sebesar 6.841.880.000,- dan Realisasi Anggaran (Pagu Real) pada Triwulan I Tahun 2025 adalah sebesar Rp. 1.786.887.816,- dengan persentase capaian sebesar 26,12%.

Melalui Laporan Kinerja (LKj) Triwulan I Tahun 2025 ini, diharapkan menjadi bahan masukan untuk perbaikan kinerja di triwulan berikutnya sehingga target kinerja yang telah ditetapkan dalam RKT dan dokumen Perjanjian Kinerja dapat tercapai sepenuhnya.

DAFTAR ISI

KATA	PEN	IGANTAR	ii
RINGI	KASA	AN EKSEKUTIF	iv
DAFT	AR IS	51	vii
DAFT	AR T	ABEL	vii
DAFT	AR G	SAMBAR	xiii
BAB I	PEN	DAHULUAN	1
	A.	Latar Belakang	1
	B.	Maksud dan Tujuan	1
	C.	Isu Aktual pada Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	2
	D.	Tugas dan Fungsi Stasiun PSDKP Tahuna	5
	E.	Sistematika Penyajian	9
BAB II	PER	RENCANAAN KINERJA	11
	A.	Rencana Strategis Direktorat Jenderal Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tahun 2020 – 2024	11
	В.	Perjanjian Kinerja Tahun 2024	.14
	C.	Pengukuran Capaian Kinerja	.17
BAB II	II AK	UNTABILITAS KINERJA	18
	A.	Capaian Kinerja Pembangunan Kelautan dan Perikanan Bidang Pengawasan SDKP Triwulan I Tahun 2024	.18
	В.	Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja	20
	C.	Akuntabilitas Sumber Daya Manusia dan Keuangan	67
BAB I	V PE	NUTUP	70
	A.	Kesimpulan	70
	В.	Rekomendasi	71

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Daftar Armada Pendukung Kegiatan Pengawasan Stasiun PSDKP Tahuna	9
Tabel 2	Perjanjian Kinerja Stasiun PSDKP Tahuna Tahun 2024	14
Tabel 3	Hasil Pengukuran Kinerja Triwulan I Tahun 2024 Stasiun PSDKP Tahuna	18
Tabel 4	"Indeks Kinerja Operasi Kapal Pengawas"	22
Tabel 5	Hasil Capaian ISK.1 "Indeks Kinerja Operasi Kapal Pengawas" Triwulan I Tahun 2024	22
Tabel 6	Perhitungan "Indeks Kinerja Kinerja Kapal Pengawas" Triwulan I Tahun 2024	23
Tabel 7	Target ISK.2 "Indeks Kinerja Operasi Speedboat Pengawasan"	26
Tabel 8	Hasil Capaian ISK.2 "Indeks Kinerja Operasi Speedboat Pengawas" Triwulan I Tahun 2024	26
Tabel 9	Perhitungan "Indeks Kinerja Operasi Speedboat Pengawas" Triwulan I Tahun 2024	27
Tabel 10	Target ISK.3 "Persentase Pemenuhan Logistik Kapal Pengawas"	31
Tabel 11	Hasil Capaian ISK.3 "Persentase Pemenuhan Logistik Kapal Pengawas" Tahun 2024	32
Tabel 12	Realisasi Anggaran Sasaran Kerja 1 "Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP yang Efektif	33
Tabel 13	Target ISK.4 "Persentase Sarana dan Prasarana Pengawasan SDKP yang Diselesaikan"	34
Tabel 14	Hasil Capaian ISK.4 "Persentase Sarana dan Prasarana Pengawasan SDKP yang Diselesaikan" Triwulan I Tahun	2.5
	2024	35

Tabel 15	Sarana Pengawasan SDKP"	35
Tabel 16	Hasil Capaian ISK.5 "Persentase Sarana dan Prasarana Pengawasan SDKP yang Diselesaikan" Triwulan I Tahun 2024	36
Tabel 17	Realisasi Anggaran Sasaran Kerja 2. "Terselenggaranya Pembangunan Serta Perawatan Sarana dan Prasarana SDKP yang Sesuai Ketentuan"	37
Tabel 18	Target Kinerja Komponen ISK.6 "Nilai Kualitas Penyelesaian Pemeriksaan Pelaku Usaha dan Pemanfaat Sumber Daya Kelautan"	38
Tabel 19	Hasil Capaian Kinerja Komponen ISK.6 "Nilai Kualitas Penyelesaian Pemeriksaan Pelaku Usaha dan Pemanfaat Sumber Daya Kelautan" Triwulan I Tahun 2024	39
Tabel 20	Pelaku Usaha Perikanan dan Non Perikanan dalam Pengelolaan Limbah yang Diperiksa Kepatuhannya Triwulan I Tahun 2024	41
Tabel 21	Pelaku Usaha Pemanfaat Jenis Ikan Dilindungi yang Diperiksa Kepatuhannya Triwulan I Tahun 2024	45
Tabel 22	Pelaku Usaha Pemanfaat Pesisir, Pulau-Pulau Kecil dan Ruang Laut yang Diperiksa Kepatuhannya Triwulan I Tahun 2024	46
Tabel 23	Pelaku Usaha Perikanan Terhadap Ketentuan Pelanggaran Destructive Fishing yang Diperiksa Kepatuhannya Triwulan I Tahun 2024	47
Tabel 24	Realisasi Anggaran Sasaran Kerja 3. "Terselenggaranya Pengawasan Pelaku Usaha Kelautan yang Sesuai Ketentuan"	49
Tabel 25	Target Kinerja Komponen ISK.7 "Nilai Kualitas Penyelesaian Pemeriksaan Pelaku Usaha dan Pemanfaat Sumber Daya Perikanan"	51

Tabel 26	Penyelesaian Pemeriksaan Pelaku Usaha dan Pemanfaat Sumber Daya Perikanan" Triwulan I Tahun 2024	52
Tabel 27	Pengawasan Penangkapan Ikan Terukur (PIT) Lingkup Stasiun PSDKP Tahuna Triwulan I Tahun 2024	55
Tabel 28	Dokumen Nomor Perizinan Berusaha Kapal Perikanan dalam Penangkapan Ikan Terukur yang Diperiksa Kepatuhannya Lingkup Stasiun PSDKP Tahuna Triwulan I Tahun 2024	56
Tabel 29	Realisasi Anggaran Sasaran Kerja 4. "Nilai Kualitas Penyelesaian Pemeriksaan Pelaku Usaha dan Pemanfaat Sumber Daya Perikanan	57
Tabel 30	Target ISK.8 "Indeks Sanksi Administratif Bidang Kelautan dan Perikanan" Tahun 2024	58
Tabel 31	Hasil Capaian ISK.8 "Indeks Sanksi Administratif Bidang Kelautan dan Perikanan" Triwulan I Tahun 2024	58
Tabel 32	Target ISK.9 "Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan"	59
Tabel 33	Hasil Capaian ISK.9 "Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan" Triwulan I Tahun 2024	60
Tabel 34	Realisasi Anggaran Sasaran Kerja 3. "Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran Administratif Bidang Kelautan dan Perikanan Sesuai ketentuan"	61
Tabel 35	Target ISK.10 "Indeks Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan"	62
Tabel 36	Hasil Capaian ISK.10 "Indeks Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan" Triwulan I Tahun 2024	62
Tabel 37	Realisasi Anggaran Sasara Kerja 6. "Terselenggaranya Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang Berkualitas	63

Tabel 38	Layanan Publik Lingkup Stasiun PSDK Tahuna"	64
Tabel 39	Hasil Capaian ISK.11 "Indeks Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan Publik Lingkup Stasiun PSDK Tahuna" Triwulan I Tahun 2024	65
Tabel 40	Target ISK.12 "Nilai yang Dipersyaratkan Untuk Membangun Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) Stasiun PSDKP Tahuna"	66
Tabel 41	Hasil Capaian ISK.12 "Nilai yang Dipersyaratkan Untuk Membangun Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) Stasiun PSDKP Tahuna" Triwulan I Tahun 2024	66
Tabel 42	Target ISK.13 "Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan Berbasis Manajemen Risiko Lingkup Stasiun PSDKP Tahuna"	67
Tabel 43	Hasil Capaian ISK.13 "Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan Berbasis Manajemen Risiko Lingkup Stasiun PSDKP Tahuna" Triwulan I Tahun 2024	68
Tabel 44	Target ISK.14 "Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Lingkup Ditjen PSDKP"	69
Tabel 45	Hasil Capaian ISK.14 "Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Lingkup Ditjen PSDKP" Triwulan I Tahun 2024	69
Tabel 46	Target ISK.15 "Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Stasiun PSDKP Tahuna"	70
Tabel 47	Hasil Capaian ISK.15 "Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Stasiun PSDKP Tahuna" Triwulan I Tahun 2024	70
Tabel 48	Target ISK.16 "Penilaian Mandiri SAKIP Stasiun PSDKP Tahuna"	71
Tabel 49	Hasil Capaian ISK.16 "Penilaian Mandiri SAKIP Stasiun PSDKP Tahuna" Triwulan I Tahun 2024	72

Tabel 50	Pengawasan Lingkup Stasiun PSDKP Tahuna yang Dokumen Tindak Lanjutnya Telah Dilengkapi dan Disampaikan"	77
Tabel 51	Hasil Capaian ISK.17 "Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup Stasiun PSDKP Tahuna yang Dokumen Tindak Lanjutnya Telah Dilengkapi dan Disampaikan" Triwulan I Tahun 2024	7:
Tabel 52	Target ISK.18 "Nilai Implementasi Program Budaya Kerja"	7
Tabel 53	Hasil Capaian ISK.18 "Nilai Implementasi Program Budaya Kerja" Triwulan I Tahun 2024	74
Tabel 54	Target ISK.19 "Inovasi Pelayanan Publik yang Diterapkan Pada Unit Kerja Stasiun PSDKP Tahuna"	7:
Tabel 55	Hasil Capaian ISK.19 "Inovasi Pelayanan Publik yang Diterapkan Pada Unit Kerja Stasiun PSDKP Tahuna" Triwulan I Tahun 2024	76
Tabel 56	Target ISK.20 "Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Manajemen Pengetahuan yang Terstandar Lingkup Stasiun PSDKP Tahuna"	7
Tabel 57	Hasil Capaian ISK.20 "Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Manajemen Pengetahuan yang Terstandar Lingkup Stasiun PSDKP Tahuna" Triwulan I Tahun 2024	7
Tabel 58	Target ISK.21 "Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup Stasiun PSDKP Tahuna"	78
Tabel 59	Hasil Capaian ISK.21 "Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup Stasiun PSDKP Tahuna" Triwulan I Tahun 2024	79
Tabel 60	Target ISK.22 "Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Stasiun PSDKP Tahuna"	80
Tabel 61	Hasil Capaian ISK.22 "Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Stasiun PSDKP Tahuna" Triwulan I Tahun 2024	80

Tabel 62	Target ISK.23 "Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup Stasiun PSDKP Tahuna"	81
Tabel 63	Hasil Capaian ISK.23 "Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup Stasiun PSDKP Tahuna" Triwulan I Tahun 2024	82
Tabel 64	Target ISK.24 "Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Lingkup Stasiun PSDKP Tahuna"	83
Tabel 65	Hasil Capaian ISK.24 "Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Lingkup Stasiun PSDKP Tahuna" Triwulan I Tahun 2024	83
Tabel 66	Realisasi Anggaran Sasaran Kerja 7. "Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup Ditjen PSDKP" pada Stasiun PSDKP Tahuna"	84
Tabel 67	Komposisi Golongan dan Kualitas Pendidikan ASN Stasiun PSDKP Tahuna	87
Tabel 68	Daftar PPNPN dan PJLP di UPT Stasiun PSDKP Tahuna	87
Tabel 69	Rincian Realisasi Anggaran Triwulan I Tahun 2025 Stasiun PSDKP Tahuna	87
Tabel 70	Rekomendasi Penutup dan Rencana Tindak Lanjut Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2025	70

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Struktur Organisasi Stasiun PSDKP Tahuna	6
Gambar 2	Kantor Stasiun Pengawasan SDKP Tahuna, Satwas SDKP Kpl. Talaud dan Wilker Salibabu	8
Gambar 3	Tampilan Awal dan Pengukuran Kinerja Pada Kinerjaku	17
Gambar 4	Kegiatan Operasi kapal Pengawas Triwulan I Tahun 2024	25
Gambar 5	Kegiatan Operasi Speedboat Pengawas Triwulan I Tahun 2024	31
Gambar 6	Pengawasan Usaha Perikanan dan Non Perikanan dalam Pengelolaan limbah Triwulan I Tahun 2024	44
Gambar 7	Pengawasan jenis Ikan yang Dilindungi Triwulan I Tahun 2024	46
Gambar 8	Pengawasan Kepatuhan Pelaku Usaha Perikanan Terhadap Ketentuan pelarangan Destructivi Fishing triwulan Tahun 2024	I 49
Gambar 9	Pengawasan Penangkapan Ikan Terukur (PIT) Triwulan I Tahun 2024	56

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Laporan Kinerja (LKj) UPT Stasiun Pengawasan SDKP Tahuna Triwulan I Tahun 2025 merupakan salah satu komponen dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah desiminasi informasi capaian kinerja dalam satu tahun anggaran berdasarkan komitmen yang telah ditetapkan sebelumnya. Laporan Kinerja ini bertujuan untuk dapat menginformasikan kegiatan-kegiatan yang menjadi fokus UPT Stasiun Pengawas Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tahuna untuk mencapai target kinerja yang telah disusun dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT).

Sesuai dengan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, Instansi Pemerintah dimana aturan tersebut mewajibkan setiap Instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara untuk membuat elemen tersebut sehinnga dapat mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas, fungsi dan peranannya dalam pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang dipercayakan kepadanya berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan dalam rangka menuju perwujudan "good governance".

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Maksud dari penyusunan Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2025 Stasiun Pengawasan SDKP Tahuna adalah untuk mengkomunikasikan pencapaian tujuan dan Sasaran Kegiatan selama Triwulan I Tahun 2025 kepada para stakeholder guna mewujudkan akuntabilitas kepada pihak-pihak yang memberi mandat atau amanah. Laporan ini merupakan perwujudan salah satu kewajiban untuk menjawab (obligation to answer) tentang apa yang sudah

diamanatkan kepada UPT Stasiun Pengawasan SDKP Tahuna. Dengan demikian LKj ini merupakan sarana untuk mengkomunikasikan dan menjawab tentang apa yang sudah dicapai selama dan bagaimana proses pencapaiannya berkaitan dengan mandat yang telah diterima.

2. Tujuan

Tujuannya adalah untuk mengetahui tingkat keberhasilan dari penerapan manajemen kinerja UPT Stasiun Pengawasan SDKP Tahuna dari tahun sebelumnya dan memperbaiki kinerja kearah lebih baik dimasa mendatang, yang dimulai dari proses perencanaan secara benar, pelaksanaan dan evaluasinya.

C. Isu Aktual pada Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Kementerian Kelautan dan Perikanan memiliki 5 Strategi Ekonomi Biru sebagai Langkah Indonesia menjaga ketahanan pangan dunia antara lain :

- 1. Target perluasan kawasan konservasi 30% dari seluruh wilayah perairan Indonesia;
- 2. Penerapan kebijakan penangkapan ikan terukur (PIT) berbasis kuota berdasarkan zonasi;
- 3. Pengembangan budidaya untuk mendorong nelayan-nelayan di zona penangkapan terukur agar dapat beralih pada budidaya yang berkelanjutan dan ramah lingkungan;
- 4. Menjamin wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil terjaga dengan baik;
- 5. Program "Bulan Cinta Laut" dengan membersihkan laut dari sampah di seluruh wilayah perairan Indonesia dan melibatkan nelayan lokal.

Guna mendukung program tersebut, Stasiun Pengawasan SDKP Tahuna sebagai salah satu unit kerja dibawah Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan melakukan pengawasan terhadap beberapa isu terkini yang dijadikan perhatian dalam pemanfaatan SDKP, yaitu:

1. Subsektor Penangkapan Ikan

- Tren kasus IUU Fishing oleh KIA di perairan wilayah kerja Stasiun PSDKP Tahuna beberapa tahun terakhir sekitar 2 kasus;
- Pengawasan Kelautan dan Perikanan di wilayah perbatasan RI –
 Filipina;
- Penerapan kebijakan penangkapan ikan terukur dalam rangka pencapaian target PNBP sektor kelautan dan perikanan;
- Potensi pelanggaran daerah penangkapan ikan yang dilakukan oleh KII;
- Kuota Penangkapan dalam Pengelolaan Lobster (*Panulirus spp.*),
 Kepiting (*Scylla spp.*), dan rajungan (*Portunus spp.*) di Wilayah
 Negara Republik Indonesia.

2. Subsektor Pembudidayaan Ikan

- Belum adanya unit budidaya ikan yang terdaftar/teregistrasi dalam Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
- Limbah budidaya ikan yang dihasilkan dan potensi dampak tehadaplingkungan sekitar;
- Penggunaan pakan dan obat ikan yang tidak terdaftar dalam register;
- Kegiatan pembudidayaan dan pengelolaan Lobster (*Panulirus spp.*),
 Kepiting (*Scylla spp.*), dan rajungan (*Portunus spp.*) di Wilayah
 Negara Republik Indonesia.

3. Subsektor Pengolahan Hasil Perikanan

 Banyaknya unit pengolahan ikan yang tidak terdaftar/teregistrasi dalam Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;

- Belum adanya sertifikasi HACCP dan SKP dalam Unit Pengolahan yangterperiksa;
- Penggunaan bahan tambahan pangan (BTP) yang berbahaya;
- Kegiatan pengolahan ikan yang tidak sesuai dengan standar GMP dan SSOP.

4. Subsektor Pengangkutan dan Pemasaran Ikan

- Belum adanya pelaku usaha pengangkutan dan pemasaran ikan yang terdaftar/teregistrasi dalam Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
- Kegiatan lalu lintas Lobster (*Panulirus spp.*), Kepiting (*Scylla spp.*), dan Rajungan (*Portunus spp.*) di Wilayah Negara Republik Indonesia;
- Potensi tindak pidana penyelundupan pada kegiatan Lalu Lintas
 Produk Perikanan Tertentu (Benih Bening Lobster).

5. Pencemaran Perairan

• Potensi pencemaran perairan yang disebabkan oleh limbah hasil kegiatan perikanan maupun non perikanan.

6. Kegiatan Penangkapan Ikan yang Merusak (*Destructive Fishing*)

 Kegiatan perikanan yang bersifat merusak habitat serta kelestariannya, seperti penangkapan ikan yang melebihi batas potensi lestarinya (*over fishing*), penggunaan bahan peledak dan bahan beracun, penggunaan kompresor pada kegiatan penangkapan ikan, serta penyetruman ikan.

7. Pemanfaatan Ikan yang Dilindungi

- Kurangnya pengetahuan masyarakat terkait ikan serta biota laut yang dilarang, dilindungi dan dibatasi dalam pemanfaatannya;
- Terdapat beberapa spesies ikan dan biota laut yang minim

populasinya dan terancam punah.

8. Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

- Pemanfaatan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang tidak memiliki izin dari Pemerintah Republik Indonesia;
- Penguasaan pulau-pulau kecil oleh pihak lain (perseorangan dan swasta) baik berupa PMA/PMDN yang diharuskan melalui mekanisme perizinan;
- Potensi kerusakan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil serta ruang laut dampak dari kegiatan pemanfaatannya;
- Kegiatan pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil serta ruang laut yang tidak sesuai dengan peraturan perundangundangan.

D. Tugas dan Fungsi Stasiun PSDKP Tahuna

1. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 69 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Stasiun Pengawasan SDKP Tahuna merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, yang mempunyai tugas melaksanakan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan. Dalam melaksanakan tugasnya, UPT Stasiun PSDKP Tahuna menyelenggarakan beberapa fungsi yaitu:

- a) Penyusunan rencana, program dan anggaran, pemantauan dan evaluasi, serta laporan;
- b) Pelaksanaan operasional pengawasan pemanfaatan sumber daya kelautan danperikanan;
- c) Pelaksanaan penyiapan logistik dan pemeliharaan Kapal Pengawas

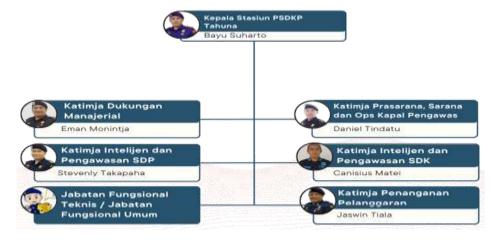
Perikanan;

- d) Pelaksanaan penanganan pelanggaran pemanfaatan sumber daya kelautan danperikanan;
- e) Pelaksanaan pengelolaan sarana dan prasarana pengawasan; dan
- f) Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

2. Struktur Organisasi

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi organisasi yang telah ditetapkan, perlu dilakukan pembagian tugas dan kewenangan yang digambarkan dalam struktur organisasi. Dalam pelaksanaan tugasnya, Kepala Stasiun didukung dengan 5 Ketua Tim Kerja (Katimja) serta Kelompok Jabatan Fungsional, dimana masing-masing mempunyai tugas dan kewenangan seperti diuraikan dibawah ini:

Gambar 1
Struktur Organisasi Stasiun PSDKP Tahuna



a) Kepala Stasiun:

Merumuskan kebijakan operasional, mengkoordinasikan, mengarahkan dan melaksanakan manajerial dibidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan serta melakukan pembinaan kepada bawahan di lingkungan UPT Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tahuna untuk mencapai kelancaran pelaksanaan tugas.

b) Katimja Dukungan Manajerial:

Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program dan anggaran serta pengelolaan urusan administrasi keuangan, barang kekayaan milik negara, kepegawaian dan jabatan fungsional, persuratan, kearsipan, perlengkapan dan rumah tangga.

c) Katimja Prasarana, Sarana dan Operasional Kapal Pengawas :

Melakukan pelaksanaan operasional dan penyiapan logistik kegiatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, pemeliharaan sarana dan prasarana pengawasan, perencanaan dan pengembangan pengawakan kapal pengawas.

d) Katimja Intelijen dan Pengawasan Sumber Daya Perikanan:

Mengkoordinir kegiatan pengawasan sumber daya perikanan mulai dari perencanaan, evaluasi, dokumentasi, pengumpulan informasi dan pelaporan.

e) Katimja Intelijen dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan :

Mengkoordinir kegiatan pengawasan sumber daya kelautan mulai dari perencanaan, evaluasi, dokumentasi, pengumpulan informasi dan pelaporan.

f) Katimja Penanganan Pelanggaran

Mengkoordinir kegiatan penanganan tindak pidana kelautan dan perikanan dan sanki administratif mulai dari perencanaan, evaluasi, dokumentasi, informasi dan pelaporan.

g) Kelompok Jabatan Fungsional:

Melaksanakan kegiatan sesuai dengan pembagian tim kerja dan fungsi masing-masing jabatan fungsional, serta melaksanakan tugas kedinasan sesuai dengan arahan Pimpinan dan Katimja.

Untuk mendukung terlaksananya kegiatan pengawasan SDKP secara baik sampai ke daerah, maka telah di bentuk Satuan Pengawasan dan Wilayah Kerja PSDKP di bawah koordinasi UPT Stasiun PSDKP Tahuna, yang meliputi 1 Satwas SDKP (Satwas SDKP Talaud) dan 1 Wilker PSDKP (Wilker Salibabu).

Gambar 2
Kantor Stasiun Pengawasan SDKP Tahuna, Satwas SDKP Kpl. Talaud dan Wilker
PSDKP Salibabu



Selain itu untuk mendukung kegiatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, Stasiun PSDKP Tahuna dibekali dengan armada pengawasan berupa 1 Unit Kapal Pengawasa KP. Hiu 15 dan 2 Unit Speedboat Pengawasan Napoleon 039 di bawah kendali Stasiun PSDKP Tahuna dan Speedboat Napoleon 017 dibawah kendali Satwas SDKP Talaud.

Tabel 1 Daftar Armada Pendukung Kegiatan Pengawasan Stasiun PSDKP Tahuna

Foto Kapal	Nama Kapal	Bahan Kapal	Tahun Pembuatan	Gross Tonnage	Jumlah Awak Kapal
	KP. Hiu 15 Length Of All (LOA) 32, 10 Meter	Alluminium Alloy	2015	153 GT	11 Orang
	Speedboat Napoleon 039 Length Of All (LOA) 12 Meter	Fiber - Reinford Plastic	2015	15 GT	10 Orang
	Speedboat Napoleon 017 Length Of All (LOA) 12 Meter	Fiber - Reinford Plastic	2012	15 GT	10 Orang

E. Sistematika Penyajian

Sistem Penyajian LKj Triwulan I Tahun 2025 UPT Stasiun PSDKP Tahuna, secara garis besar diuraikan sebagai berikut:

1. Bab I. Pendahuluan

Menjelaskan secara ringkas tentang latar belakang, maksud dan tujuan penyusunan LKj, tugas dan fungsi organisasi data umum organisasi UPT Stasiun Pengawasan SDKP Tahuna.

2. Bab II. Perencanaan Kinerja

Menjelaskan secara ringkas tentang rencana strategis UPT Stasiun PSDKP Tahuna untuk Periode 2025-2029 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2025.

3. Bab III. Akuntabilitas Kinerja

Menjelaskan uraian hasil pengukuran Kinerja, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja dan Akuntabilitas Keuangan.

4. Bab IV. Penutup

Menjelaskan kesimpulan menyeluruh dari LKj Triwulan I Tahun 2025 Stasiun Pengawasan SKP Tahuna dan rekomendasi perbaikan kinerja di masa mendatang.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya agar efektif, efisien dan akuntabel, Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Ditjen PSDKP) berpedoman pada dokumen perencanaan terdiri dari: (1) Renstra Ditjen, PSDKP 2025 - 2029 Ditjen Tahun 2025 - 2029; (2) Rencana Kerja; dan (3) Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang telah disempurnakan dengan pendekatan sistem pengelolaan kinerja berbasis Balance Score Cards (BSC).

A. Rencana Strategis Direktorat Jenderal Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tahun 2025 – 2029

Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal PSDKP 2025 - 2029 merupakan perencanaan jangka menengah yang berisi tentang gambaran sasaran atau kondisi hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun beserta strategi yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran sesuai tugas dan fungsi yang diamanatkan. Renstra tersebut disusun selaras dengan arah kebijakan strategis nasional bidang kelautan dan perikanan sebagaimana tertuang dalam arah kebijakan KKP 2025 - 2029. Renstra disusun dengan menggunakan evaluasi renstra periode sebelumnya, asumsi dipertanggungjawabkan serta kombinasi pendekatan bottom up dan top down dengan keterlibatan Eselon I, Eselon II, Eselon III dan Eselon IV lingkup Direktorat Jenderal PSDKP. Pendekatan top down mengandung makna bahwa perencanaan ini memperhatikan pula ketersediaan anggaran sesuai dengan estimasi APBN. Sedangkan pendekatan bottom up dilakukan untuk memperoleh gambaran kebutuhan pendanaan guna mewujudkan kondisi ideal.

Secara ringkas arah kebijakan Direktorat Jenderal PSDKP tahun 2025 – 2029 untuk mendukung Sasaran Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan

dan Perikanan, diuraikan sebagai berikut:

- Pengembangan SDM Aparatur Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang berkualitas dan berdaya saing;
- 2. Peningkatan kapasitas sarana, prasarana dan kelembagaan pengawasan SDKP;
- Penguatan sinergi dengan penegak hukum di laut (TNI AL, POLRI, Bakamla);
- 4. Peningkatan komunikasi dengan stakeholder dan pelaku usaha kelautan dan perikanan;
- 5. Peningkatan kesadartahuan dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan SDKP.

Bedasarkan arah kebijakan pengawasan SDKP tersebut, ditetapkan Sasaran Kegiatan pencapaian dengan program kegiatan yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun kedepan. Sasaran Kegiatan tersebut digunakan juga untuk penyusunan rencana kerja dan perjanjian kinerja Ditjen PSDKP.

Arah kebijakan pengawasan SDKP tentunya harus ditindaklanjuti dan diterjemahkan pada kegiatan yang dilaksanakan pada setiap Satker dalam sasaran kegiatannya. Sasaran kegiatan tersebut diatas dapat dijabarkan sebagai berikut:

- Pengembangan SDM Aparatur Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkualitas dan berdaya saing, dengan cara:
 - a. Membangun budaya kerja Direktorat Jenderal PSDKP;
 - b. Mengembangkan kompetensi SDM Aparatur PSDKP
 - c. Membangun pola karir PNS Direktorat Jenderal PSDKP;
 - d. Meningkatkan jumlah dan sebaran SDM Aparatur PSDKP.
- 2. Peningkatan kapasitas teknologi pemantauan, sarana, prasarana dan kelembagaan pengawasan SDKP, dengan cara;
 - a. Membangun sarana pengawasan (kapal pengawas, *speed boat* dan sarana pengawasan lainnya);

- b. Membangun prasarana pengawasan yang memadai;
- c. Meningkatkan pemeliharaan kapal pengawas agar siap operasional;
- d. Mengembangkan kelembagaan pengawasan.
- 3. Penguatan sinergi dengan penegak hukum (TNI AL, POLRI, Bakamla, Bea Cukai, Kejaksaan Agung dan instansi terkait lainnya), dengan cara:
 - a. Operasi bersama pengawasan di laut dan di darat (TNI AL, POLRI, Bakamla, Bea Cukai, KLHK)
 - b. Pertukaran data/informasi (intelijen, operasi)
 - c. Penanganan tindak pidana kelautan dan perikanan (Kejaksaan Agung);
 - d. Peningkaan kapasitas SDM Pengawasan;
 - e. Forum Koordinasi Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan (TNI AL, POLRI, Bakamla dan Kejaksaan Agung).
- 4. Peningkatan komunikasi dengan *stakeholder* dan pelaku usaha kelautan dan perikanan, dengan cara:
 - a. Memperkuat sinergitas dan harmonisasi pengawasan SDKP dengan Pemerintah Daerah serta lintas sektor di lingkar Pusat;
 - b. Memelihara komitmen bersama dengan lembaga internasional dan regional dalam pemberantasan IUU fishing;
 - c. Menjalankan alur pendekatan pengawasan secara komprehensif, yakni: pencegahan (*preventif*), pembinaan, penegakan hukum dengan pendekatan sanksi pidana sebagai pilihan terakhir (*ultimum remedium*);
 - d. Menerapkan metode *auditing* dalam pengawasan SDKP yang mengedepankan upaya perbaikan berkelanjutan terhadap temuan ketidaksesuaian bagi para pelaku usaha kelautan dan perikanan.
- 5. Peningkatan kesadartahuan dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan SDKP, dengan cara:
 - a. Meningkatkan kesadartahuan masyarakat dalam pemanfaatan

- SDKP yang tertib dan bertanggung jawab;
- b. Pemberian pemahaman kepada nelayan untuk tidak melintas batas ke perairan negara lain;
- c. Optimalisasi peran serta masyarakat dalam mendukung pengawas SDKP melalui POKMASWAS;
- d. Menanamkan pengetahuan pengelolaan SDKP yang bertanggung jawab sejak dini melalui "PSDKP Mengajar";
- e. Meningkatkan peran aktif pemuda melalui "Pemuda Pelopor Pengawasan":
- f. Memberikan apresiasi dan penghargaan kepada Pokmaswas yang berkontribusi besar;
- g. Membuat inovasi dalam pelayanan publik.

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Stasiun PSDKP Tahuna secara khusus memiliki Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan terkait dengan target kinerja pada tahun 2025. Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil. Maka sesuai jenjang hierarki, UPT Stasiun Pengawasan SDKP Tahuna diberi amanah oleh Direktorat Jenderal PSDKP untuk menjalankan tugas sesuai penetapan kinerja.

Tabel 2 Perjanjian Kinerja Stasiun PSDKP Tahuna Tahun 2025

NO	SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	
SK.1	Terselenggaranya intelijen kelautan dan perikanan secara efektif	1.	Tingkat akurasi dan validitas hasil intelijen kelautan [Nilai]	75
SK.2	Terselenggaranya pengawasan sumber daya kelautan	2.	Indeks pemeriksaan pelaku usaha kelautan [Indeks]	100
SK.3	Terselenggaranya pengawasan sumber daya	3.	Indeks pemeriksaan pelaku usaha perikanan [Indeks]	100

NO	SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		
	perikanan				
SK.4	Terselenggaranya operasi	4.	Indeks operasi kapal pengawas	92	
	armada pengawasan SDKP		[Indeks]		
	secara efektif	5.	Indeks operasi speedboat	92	
			pengawas [Indeks]		
SK.5	Terselenggaranya	6.	Persentase pemeliharaan dan	100	
	pembangunan serta		perawatan prasarana dan sarana		
	perawatan sarana dan		pengawasan SDKP [Persentase]		
	prasarana Pengawasan SDKP				
	yang sesuai ketentuan				
SK. 6	Terselenggaranya	7.	Indeks pengenaan sanksi	81	
	penanganan pelanggaran		administratif bidang kelautan		
	administratif bidang kelautan		dan perikanan [Indeks]		
	dan perikanan yang efektif				
	dan sesuai ketentuan				
SK. 7	Terselenggaranya penyidikan	8.	Indeks Penyelesaian Penyidikan	94	
	tindak pidana kelautan dan		Tindak Pidana Kelautan dan		
	perikanan yang efektif dan		Perikanan [indeks]		
	sesuai ketentuan				
SK. 8	Tata kelola pemerintahan	9.	Nilai Kinerja Perencanaan	71,5	
	yang efektif, lincah dan		Anggaran Satker Stasiun PSDKP		
	akuntabel dalam pengawasan		Tahuna [Nilai]		
	sumber daya kelautan dan	10.	Indikator Kinerja Pelaksanaan	92	
	perikanan		Anggaran (IKPA) Satker lingkup		
			Stasiun PSDKP Tahuna [Nilai]		
		11.	Indeks Profesionalitas ASN	81	
			Stasiun PSDKP Tahuna [Indeks]		
		12.	Penilaian Mandiri SAKIP Satker	88	
			Stasiun PSDKP Tahuna [Nilai]		
		13.	Persentase pelaksanaan	100	
			pengendalian kegiatan berbasis		
			Manajemen Risiko unit kerja		
			lingkup Stasiun PSDKP Tahuna		
			[Persentase]		
		14.	Persentase jumlah rekomendasi	95	
			hasil pengawasan unit kerja		

NO	SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	TARGET
		15.	lingkup Stasiun PSDKP Tahuna yang dokumen tindaklanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan [Persentase] Nilai Kepuasan Masyarakat pengguna layanan publik unit kerja lingkup Stasiun PSDKP	88,5
		16.	Tahuna [Nilai] Nilai minimal yang dipersyaratkan untuk pembangunan unit kerja berpredikat menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK) unit kerja lingkup Stasiun PSDKP Tahuna [Nilai]	80
		17.	Nilai pengawasan kearsipan internal Stasiun PSDKP Tahuna [Nilai]	80
		18.	Inovasi pelayanan publik yang diterapkan Stasiun PSDKP Tahuna [Unit]	1
		19.	Nilai implementasi Program Budaya Kerja [Nilai]	70

C. Pengukuran Capaian Kinerja

Pengukuran tingkat capaian IKU dilakukan dengan berpedoman pada formula penghitungan yang telah ditetapkan dalam manual IKU. Selanjutnya nilai capaian tersebut dihitung dengan membandingkan antara realisasi capaian dengan target yang telah ditetapkan. Pengukuran capaian kinerja dilakukan secara berkala melalui penyusunan laporan kinerja yang didukung dengan implementasi pada Aplikasi *Kinerjaku* yang merupakan aplikasi berbasis informasi teknologi.

Gambar 3 Tampilan Awal dan Pengukuran Kinerja pada Kinerjaku



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Pembangunan Kelautan dan Perikanan Bidang Pengawasan SDKP Triwulan I Tahun 2025

Stasiun PSDKP Tahuna pada akhir Triwulan I Tahun 2025 mendapatkan skor kinerja sebesar 100,83 dengan ditunjukkan pada indikator yang berwarna hijau pada aplikasi *Kinerjaku* dengan predikat "Baik". Stasiun PSDKP Tahuna tetap mempertahankan tren positif dalam perolehan capaian kinerja dengan mendapatkan capaian >100% seperti tahun sebelumnya. Secara terperinci dan spesifik capaian kinerja Stasiun PSDKP Tahuna pada Triwulan I Tahun 2025 dapat dijelaskan melalui penjabaran informasi sebagai berikut:

Capaian Indikator Kinerja Utama Pengawasan SDKP Triwulan I Tahun
 2025

Capaian Indikator Kinerja Utama Stasiun PSDKP Tahuna Triwulan I Tahun 2025 ditabulasikan pada Tabel 3. dibawah ini.

Tabel 3 Hasil Pengukuran Kinerja Triwulan I Tahun 2025 Stasiun PSDKP Tahuna

Stasiun PSDKP Tahuna	Level II
Bayu Y. Suharto, S.St.Pi, M.Si	Periode Triwulan I Tahun 2025
19850616 200701 1 003	
Kepala Stasiun PSDKP Tahuna	

Sasaran Kegiatan / Indikator Sasaran Kinerja	Target Triwulan I Tahun 2025	Capaian Triwulan I Tahun 2025	%	Status
SK.1 Terselenggaranya Intelijen Kela				
IK.1 Tingkat akurasi dan validasi hasil intelijen kelautan (Nilai)				
SK.2 Terselenggaranya Pengawasan				
IK.2 Indeks pemeriksaan pelaku usaha kelautan (Indeks)	100	100	100	

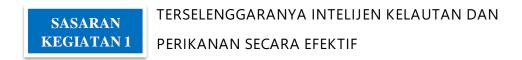
SK.3 Terselenggaranya Pengawasan				
IK.3 Indeks pemeriksaan pelaku usaha perikanan (Indeks)	100	100	100	
SK.4 Terselenggaranya Operasi Arm				
IK.4 Indeks operasi kapal pengawas (Indeks)				
IK.5 Indeks operasi speedboat pengawas (Indeks)				
SK.5 Terselenggaranya Pembangun Prasarana Pengawasan SDKP ya				
IK.6 Persentase pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana pengawasan SDKP (%)	100	100	100	
SK.6 Terselenggaranya Penanganar Kelautan dan Perikanan yang E				
IK.7 Indeks Pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan (Indeks)				
SK.7 Terselenggaranya Penyidikan T Perikanan yang Efektif dan Sesi		utan dan		
IK.8 Indeks penyelesaian penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan (Indeks)				
SK.8 Tata Kelola Pemerintahan yang dalam Pengawsan Sumber Day				
IK.9 Nilai kinerja perencanaan anggaran satker Stasiun PSDKP Tahuna (Nilai)				
IK.10 Indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) satker lingkup Stasiun PSDKP Tahuna (Nilai)				
IK.11 Indeks profesionalitas ASN Stasiun PSDKP Tahuna (Indeks)				
IK.12 Penilaian mandiri SAKIP satker Stasiun PSDKP Tahuna (Nilai)				
IK.13 Persentase pelaksanaan pengendalian kegiatan berbasis Manajemen Risiko	100,00	100,00	100,00	

unit kerja lingkup Stasiun PSDKP Tahuna (%)				
IK.14 Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan unit kerja lingkup Stasiun PSDKP	95,00	100,00	105,26	
Tahuna yang dokumen tindaklanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%)				
IK.15 Nilai kepuasan masyarakat	88,50	91,67	103,58	
pengguna layanan publik unit kerja lingkup Stasiun				
PSDKP Tahuna (Nilai)				
IK.16 Nilai minimal yang				
dipersyaratkan untuk				
pembangunan unit kerja				
berpredikat menuju wilayah				
bebas dari korupsi (WBK)				
unit kerja lingkup Stasiun				
PSDKP Tahuna (Nilai)				
IK.17 Nilai pengawasan kearsipan internal Stasiun PSDKP				
Tahuna (Nilai)				
IK.18 Inovasi pelayanan publik				
yang diterapkan Stasiun				
PSDKP Tahuna (Unit)				
IK.19 Nilai implementasi program budaya kerja (Nilai)				



B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Hingga akhir Triwulan I Tahun 2025, UPT Stasiun PSDKP Tahuna telah melaksanakan kegiatan yang menjadi tugas dan fungsinya dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Evaluasi dan analisis pada setiap sasaran kegiatan dapat diuraikan sebagai berikut:



Pencapaian Sasaran Kegiatan "Terselenggaranya Intelijen Kelautan dan Perikanan Secara Efektif" Triwulan I Tahun 2025 belum terdapat target dan capaian yang ditentukan serta diidentifikasikan ke dalam 1 (satu) ISK, yaitu:



Tingkat Akurasi dan Validasi Hasil Intelijen Kelautan (Nilai)

ISK. 1 "Tingkat Akurasi dan Validasi Hasil Intelijen Kelautan" ditetapkan sebagain IKU dengan target indeks pada Tahun 2025 sebesar 75,00 Target Kinerja ISK.1 "Indeks kinerja operasi kapal pengawas" berdasarkan Renstra dapat dilihat pada Tabel 4. berikut ini :

Tabel 4. "Tingkat Akurasi dan Validasi Hasil Intelijen Kelautan"

Indikator Sasaran Kinerja	Target 2025 (Tahun Berjalan dan Awal Periode Renstra)	Target 2026	Terget 2027	Target 2028	Target 2029
Tingkat Akurasi dan Validasi Hasil Intelijen Kelautan	75,00 (Nilai)				

Pada tahun 2025 yang merupakan awal periode Renstra terdapat target Nilai sebesar 75,00. Hingga akhir Triwulan I tahun 2025, belum dapat dilakukan pengukuran dikarenakan periode pengukuran menggunakan periode Tahunan. Adapun informasi dapat dilihat pada Tabel 5. Berikut ini.

Tabel 5. Hasil Capaian ISK.1 "Tingkat Akurasi dan Validasi Hasil Intelijen Kelautan" Triwulan I Tahun 2025

Indikator		25 lai)	Persen)26	Persen	20		Persen	202		Persen	20	29	Persen
Sasaran Kinerja	Т	C		Т	C		Т	C		Т	С		Т	С	
Tingkat Akurasi dan Validasi Hasil Intelijen Kelautan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Berdasarkan informasi dari tabel diatas, belum terdapat target maupun capaian kinerja pada Triwulan I Tahun 2025. Hal tersebut dikarenakan pengukuran pada ISK.1 dilakukan pada akhir tahun. Apabila dibandingkan dengan capaian pada triwulan pada tahun-tahun sebelumnya, belum dapat dibandingkan dikarenakan tahun 2025 merupakan awal periode Renstra serta belum terdapat target yang ditentukan maupun capaian yang diperoleh.

Alokasi anggaran yang digunakan untuk mendukung tercapainya Sasaran Kinerja 1. ""Tingkat Akurasi dan Validasi Hasil Intelijen Kelautan" dialokasikan pada Kode Mata Anggaran Kegiatan



Pencapaian Sasaran Kegiatan "Terselenggaranya Pengawasan Sumber Daya Kelautan" pada Triwulan I Tahun 2025 sebesar 100,00 berpredikat "Baik" dan diidentifikasikan ke dalam 1 (satu) ISK, yaitu :



Indeks Pemeriksaan Pelaku Usaha Kelautan (indeks)

ISK.2 "Indeks Pemeriksaan Pelaku Usaha Kelautan (Indeks)" ditetapkan sebagai IKU dengan target persentase pada Tahun 2025 sebesar 100,00%, dimana memiliki 4 (empat) komponen sebagai berikut:

- Kepatuhan pelaku usaha perikanan dan non perikanan dalam pengelolaan limbah;
- Kepatuhan pelaku usaha pemanfaatan jenis ikan yang dilindungi;
- Kepatuhan pelaku usaha wilayah pesisir, pulau-pulau kecil dan ruang laut;
- Kepatuhan pelaku usaha perikanan terhadap ketentuan pelarangan destructive fishing.

Persentase perhitungan nilai terdiri dari tiga tahapan kegiatan yang dipersyaratkan dari Manual IKU, yaitu: Tahapan persiapan (10%) yang dibuktikan dengan SPT, Surat pemberitahuan dan Daftar pertanyaan; Tahapan pemeriksaan kesesuaian kegiatan Usaha dengan peraturan perundangundangan (70%) yang terdiri dari Berita acara pemeriksaan dan Formulir pemeriksaan SDK; serta Tahapan pelaporan (20%) yang terdiri dari Laporan Hasil Pemeriksaan. Apabila kegiatan pengawasan sumber daya kelautan telah memenuhi persyaratan tersebut maka capaiannya didapatkan sebesar 100%.

Target Kinerja ISK.2 "Indeks Pemeriksaan Pelaku Usaha Kelautan (Indeks)" berdasarkan Renstra dapat dilihat pada Tabel 6. berikut ini.

Tabel 6 Target Kinerja Komponen ISK.2 "Indeks Pemeriksaan Pelaku Usaha Kelautan"

Komponen Indikator Sasaran Kinerja	Target 2025 (Tahun Berjalan dan Awal Periode Renstra)	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029
Kepatuhan pelaku usaha perikanan dan non perikanan dalam pengelolaan limbah		-	-	-	-
Kepatuhan pelaku usaha pemanfaatan jenis ikan yang dilindungi	RKK 1 PU	-	-	-	-
Kepatuhan pelaku usaha pemanfaatan pesisir, pulau-pulau kecil dan ruang laut	Ketaatan 100%	-	-	-	-
Kepatuhan pelaku usaha perikanan terhadap ketentuan pelarangan <i>destructive fishing</i>		-	-	-	-

Keterangan : RKK: Rencana Kerja Keuangan; ISK: Indikator Sasaran Kerja; T: Target; C: Capaian; PU: Pelaku Usaha

Pada tahun 2025, yang merupakan awal periode Renstra terdapat total target 15 pelaku usaha dengan tingkat ketaatan 100,00%. Adapun capaian kinerja Triwulan I Tahun 2025 pada ISK.2 dapat dilihat pada Tabel 7. sebagai berikut:

Tabel 7 Hasil Capaian Kinerja Komponen ISK.2 "Indeks Pemeriksaan Pelaku Usaha Kelautan (Indeks)" Triwulan I Tahun 2025

Komponen	Т	W I	202	25	T	WI	202	:6	T۱	WΙ	202	27	T	W I	202	8	Т	WΙ	202	9
Indikator Sasaran Kinerja	Rk	Κ	IS	SK	Rk	(K	IS	K	RK	ίK	IS	K	Rk	ΚK	IS	SK .	Rł	Κ	IS	K
	Т	С	Т	С	T	С	T	С	Т	С	T	С	Т	C	Т	С	T	С	T	С
Kepatuhan pelaku usaha perikanan dan non perikanan dalam pengelolaan	1 PU	1 PU	100 %	100 %	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	ı	-	-	-	-

Komponen	Т	W I	202	25	Т	W I	202	:6	T۱	WΙ	202	27	T	W I	202	8	Т	W I	202	9
Indikator Sasaran Kinerja	Rk	Κ	IS	SK	Rk	Κ	IS	K	RK	ίK	IS	K	RI	Κ	15	K	RI	Κ	IS	K
,	T	С	T	С	T	С	T	С	Т	С	Т	С	T	С	Т	С	Т	С	T	С
limbah																				
Kepatuhan pelaku usaha pemanfaatan jenis ikan yang dilindungi	1 PU	1 PU	100	100 %	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Kepatuhan pelaku usaha pemanfaatan pesisir, pulau- pulau kecil dan ruang laut	-	-	1	ı	1	-	1	1	-	-	-	1	1	1	-	1	-	1	1	-
Kepatuhan pelaku usaha perikanan terhadap ketentuan pelarangan <i>destructive fishing</i>	2 PU	2 PU	100 %	100 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Keterangan : RKK: Rencana Kerja Keuangan; ISK: Indikator Sasaran Kerja; T: Target; C: Capaian; PU: Pelaku Usaha

Berdasarkan target kinerja Triwulan I Tahun 2025, Stasiun PSDKP Tahuna mendapatkan capaian kinerja pada ISK.2 sebesar 100,00%. Dari pencapaian kinerja keempat komponen ISK tersebut, maka pada akhir Triwulan I Tahun 2025 Stasiun PSDKP Tahuna mendapatkan nilai capaian kinerja pada SK.2 di aplikasi *Kinerjaku* sebesar 100,00% berpredikat "Baik".

Apabila dibandingkan dengan capaian tahun-tahun sebelumnya, nilai capaian ISK tersebut tidak dapat dibandingkan, dikarenakan pada tahun 2025 merupakan awal periode Renstra, sehingga tidak terdapat target ataupun capaian yang bisa dibandingkan. Dari segi jumlah pelaku usaha, pada akhir Triwulan I Tahun 2025 telah mencapai target jumlah pengawasan pelaku usaha kelautan yang ditentukan. Dari segi ketaatan, telah tercapai sesuai dengan

dipersyaratkan.

Tercapainya target kinerja tersebut disebabkan beberapa kegiatan yang dilaksanakan di Tahun 2025, antara lain sebagai berikut:

- Tersedianya petunjuk teknis pengawasan kelautan terbaru, antara lain:
 - Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2020 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan;
 - Peraturan Direktur Jenderal PSDKP Nomor 4/PER-DJPSDKP/2017 tentang Petunjuk Teknis Pengawasan Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Perairan di sekitarnya;
 - Peraturan Direktur Jenderal PSDKP Nomor 5/PER-DJPSDKP/2020 tentang Petunjuk Teknis Pengawasan Kegiatan Penangkapan Ikan yang Merusak;
- Kegiatan Supervisi pengawasan yang dilaksanakan sebagai upaya koordinasiantara Stasiun PSDKP Tahuna dan Satwas SDKP Talaud serta Wilker SDKP Salibabu serta dengan instansi terkait berjalan sangat baik;
- Sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang pengawasan sumber dayakelautan kepada stakeholder;

Secara rinci capaian kinerja dari keempat komponen tersebut sebagai berikut:

 Kepatuhan pelaku usaha perikanan dan non perikanan dalam pengelolaan limbah

Pengawasan pencemaran perairan didasarkan kepada kepatuhan pelaku usaha perikanan dan non perikanan dalam pengelolaan limbah. Hingga akhir Triwulan I Tahun 2025, terdapat target serta capaian pada komponen kepatuhan pelaku usaha perikanan dan non perikanan dalam pengelolaan limbah, rincian capaian dapat dilihat pada Tabel 8. sebagai berikut.

Tabel 8 Pelaku Usaha Perikanan dan Non Perikanan dalam

Pengelolaan Limbah yang Diperiksa Kepatuhannya Triwulan I Tahun 2025

NO Pelaku Usaha Lokasi Jenis Pelaku Usaha I. Pada kapal perikanan telah disedikan wadah tempat pembuangan sampah organik maupun sampah plastik dan tempat pembuangan sisa pengisian minyak pelumas dan bahan lainnya 2. Selama triwulan I Tahuna Panghai PATUH dalam melaksanakan kegiatan penangkapan ikan lima wadah tempat pembuangan sampah dilanjutkan dengan tetap memperhatikan norma-norma yang berlaku pada perizinan berusaha dan memberikan sosialisasi kepada pelaku usaha mengenai pengelolaan limba yang baik agar tidak terjadi pencemaran di laut yang disebabkan oleh kegiatan penangkapan ikan					
KM. Madina Tahuna Kelurahan Tidore, Kec. Tahuna Timur Kab. Kepl Sangihe Penangkapan Ikan Tahuna Kelurahan Tidore, Kec. Tahuna Timur Kab. Kepl Sangihe Penangkapan Ikan Tahuna Timur Kab. Kepl Sangihe Penangkapan Ikan Timur Kab. Kepl Sangihe Penangkapan Timur Kab. Kepl Sangiha Manusah Timur Ka	NO	Pelaku Usaha	Lokasi	Hasil Pengawasan	
	1		Kec. Tahuna Timur Kab. Kepl	 perikanan telah disedikan wadah tempat pembuangan sampah organik maupun sampah plastik dan tempat pembuangan sisa pengisian minyak pelumas dan bahan lainnya 2. Selama triwulan I Tahun 2025 terindikasi PATUH dalam melaksanakan kegiatan penangkapan	dilanjutkan dengan tetap memperhatikan norma-norma yang berlaku pada perizinan berusaha dan memberikan sosialisasi kepada pelaku usaha mengenai pengelolaan limba yang baik agar tidak terjadi pencemaran di laut yang disebabkan oleh kegiatan penangkapan

Pada Triwulan I Tahun 2025, terdapat 1 (satu) pelaku usaha perikanan dan non perikanan dalam pengelolaan limbah yang diperiksa yakni KM. Madina Tahuna yang dilakukan pengawasan sebanyak 1 (satu) kali pada bulan Februari yaitu dengan jenis kegiatan Unit Kapal Perikanan. Hasil pengawasan diperoleh keterangan bahwa pada satu unit usaha kapal perikanan tersebut telah melaksanakan kegiatan operasional dengan patuh dan tidak terdapat pencemaran yang dihasilkan oleh kegiatan operasional tersebut. Target pada Triwulan I Tahun 2025 tercapai dengan terperiksanya 1 (satu) pelaku usaha dan memenuhi target kelengkapan dokumen dengan nilai 100,00%.

Gambar 4
Pengawasan Usaha Perikanan dan Non Perikanan dalam
Pengelolaan Limbah Triwulan I Tahun 2025





2) Kepatuhan Pelaku Usaha Pemanfaat Jenis Ikan Yang Dilindungi

Kepatuhan pelaku usaha pemanfaatan jenis ikan yang dilindungi mencakup kegiatan pengawasan penangkapan/pengambilan, pengembangbiakan/budidaya, perdagangan, penelitian dan pengembangan (termasuk bioteknologi dan biofarmakologi), akuaria, dan pertukaran, serta pemeliharaan untuk kesenangan jenis ikan dilindungi dan/atau Appendiks CITES sesuai ketentuan perlindungannya pada taksa pisces, crustacea, mollusca, coelenterata, echinodermata, amphibia, reptilia, algae dan biota perairan lainnya yang hidup di laut, air tawar dan air payau untuk kegiatan penelitian dan pengembangan, pengembangbiakan, perdagangan/peredaran, aquaria, pertukaran dan pemeliharaan untuk kesenangan. Pada Triwulan I Tahun 2025, terdapat capaian pada komponen kepatuhan pelaku usaha pemanfaatan jenis ikan yang dilindungi, dengan rincian capaian dapat dilihat pada Tabel 29. sebagai berikut.

Tabel 9 Pelaku Usaha Pemanfaat Jenis Ikan yang Dilindungi yang Diperiksa Kepatuhannya Triwulan I Tahun 2025

No	Pelaku Usaha	Lokasi	Jenis Pelaku Usaha	Hasil Pengawasan	Tindak Lanjut
1	Widiawati Lawendatu	Kampung Petta, Kec. Tabukan Utara, Kab. Kepl Sangihe	Penangkapan/ Pengambilan Ikan Bersirip (<i>Pisces</i>) yang Dilindungi dan/atau Termasuk Dalam Appendiks CITES (03151)	J	Kegiatan usaha dapat dilanjutkan dengan tetap memperhatikan hak dan kewajiban sebagaimana tertuang dalam dokumen perizinan
	Penjelasan warna:	TW I Tahun 2025	TW II Tahun 2025	TW III Tahun 2025	TW IV Tahun 2025

Pada tabel diatas realisasi pelaku usaha pemanfaatan ikan yang dilindungi, hingga akhir Triwulan I Tahun 2025 terdapat 1 (satu) Pelaku Usaha atas nama Widiawati Lawendatu yang melakukan kegiatan pemanfaatan ikan yang dilindungi dengan kelompok jenis ikan Hiu dan Pari dimana dari kedua jenis ikan tersebut, terdapat beberapa spesies yang dilindungi. Hasil pengawasan diperoleh keterangan bahwa pelaku usaha telah memiliki dokumen perizinan berusaha serta dokumen Surat Izin Pemanfaatan Jenis Ikan (SIPJI) Dalam Negeri. Target pada Triwulan I Tahun 2025 telah tercapai dengan terperiksanya 1 (satu) pelaku usaha dan telah memenuhi target kelengkapan dokumen dengan nilai 100,00%.

Gambar 5 Pengawasan Jenis Ikan yang Dilindungi Triwulan I Tahun 2025





 Kepatuhan Pelaku Usaha Pemanfaat Pesisir, Pulau-Pulau Kecil dan Ruang Laut

Pengawasan pemanfaatan wilayah pulau-pulau kecil difokuskan pada kegiatan pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan sekitarnya dengan status Penanaman Modal Asing (PMA) dan/atau Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Pada komponen kepatuhan pemanfaatan pesisir, pulau-pulau kecil dan ruang laut belum terdapat target dan capaian pada Triwulan I Tahun 2025. detail capaian dapat dilihat pada Tabel 10. sebagai berikut:

Tabel 10 Pelaku Usaha Pemanfaat Pesisir, Pulau-Pulau Kecil dan Ruang Laut yang Diperiksa Kepatuhannya Triwulan I Tahun 2025

		, , ,			
No	Pelaku Usaha	Lokasi	Jenis Pelaku Usaha	Hasil Pengawasan	Tindak Lanjut
-	-	-	-	-	-
	Penjelasan warna:	TW I Tahun 2025	TW II Tahun 2025	TW III Tahun 2025	W IV Tahun 2025

Berdasarkan informasi pada tabel diatas, hingga akhir Triwulan I Tahun 2025 belum terdapat realisasi pelaku Usaha Pemanfaatan Pesisir, Pulau-Pulau Kecil dan Ruang Laut yang terperiksa. Hal tersebut dikarenakan tidak terdapatnya target yang ditentukan pada Triwulan I Tahun 2025

4) Kepatuhan pelaku usaha perikanan terhadap ketentuan pelarangan destructive fishing

Kepatuhan pelaku usaha perikanan terhadap ketentuan pelarangan destructive fishing didasarkan pada kapal perikanan dibawah 10 GT yang diperiksa dan tidak membawa alat/bahan dan/atau hasil tangkapan yang berasosiasi dengan kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan alat/bahan yang merusak (bom ikan/racun ikan/setrum ikan). Pada komponen kepatuhan pelaku usaha perikanan terhadap ketentuan pelarangan destructive fishing, terdapat capaian dengan detail capaian dapat dilihat pada Tabel 11.

sebagai berikut.

Tabel 11 Pelaku Usaha Perikanan Terhadap Ketentuan Pelanggaran Destructive Fishing yang Diperiksa Kepatuhannya Triwulan I Tahun 2025

No	Pelaku Usaha	Lokasi	Hasil	Tindak Lanjut
1	Risto Mangadil	Kelurahan lesa, Kec. Tahuna Timur. Kab. Kepl Sangihe	Pengawasan Tidak ditemukan indikasi kegiatan <i>destructive</i> fishing. Alat tangkap yang digunakan hand line. Hasil tangkapan ikan pelagis	Pelaku usaha melanjutkan kegiatan perikanan
2	Jenerya Mamagi	Desa Sawang, Kec. Melongwane Barat, Kab. Kepl Talaud	Tidak ditemukan indikasi kegiatan <i>destructive</i> <i>fishing.</i> Alat tangkap yang digunakan hand Line. Hasil tangkapan ikan pelagis	Pelaku usaha melanjutkan kegiatan perikanan
 	Penjelasan warna:	TW I Tahun 2025 T	W II Tahun 2025 TW III Tahun 20	25 TW IV Tahun 2025

Berdasarkan informasi pada tabel diatas, realisasi pengawasan pelaku usaha perikanan terhadap ketentuan pelarangan *destructive fishing* Triwulan I Tahun 2025 berjumlah 2 (dua) pelaku usaha atas nama Risto Mangadil, dan Jenerya Mamagi. Dari 2 (dua) pelaku usaha tersebut, penggunaan alat tangkap Hand Line dengan hasil tangkapan antara lain ikan demersal dan ikan pelagis. Hasil pengawasan tidak ditemukan dugaan pelanggaran dengan indikasi melakukan kegiatan penangkapan ikan yang merusak.

Target hingga akhir Triwulan I Tahun 2025 sebesar 2 (dua) pelaku usaha dengan capaian realisasi telah terperiksa sebesar 2 (dua) pelaku usaha dan memenuhi target kelengkapan dokumen dengan nilai 100,00%.

Gambar 6
Pengawasan Kepatuhan Pelaku Usaha Perikanan Terhadap
Ketentuan Pelarangan *Destructive Fishing* Triwulan I Tahun 2025





TERSELENGGARANYA PENGAWASAN SUMBER DAYA PERIKANAN

Pencapaian Sasaran Kegiatan "Terselenggaranya Pengawasan Sumber Daya Perikanan" pada Triwulan I Tahun 2025 sebesar 100,00% berpredikat "Baik" dengan diidentifikasikan ke dalam 1 (satu) ISK, yaitu:



Indeks Pemeriksaan Pelaku Usaha Perikanan (Indeks)

ISK. 3 "Indeks Pemeriksaan Pelaku Usaha Perikanan (Indeks)" ditetapkan sebagai IKU dengan target Nilai Triwulan I Tahun 2025 sebesar 100,00 terdiri dari 6 (enam) detail sebagai berikut:

- Pengawasan rutin berbasis OSS (*One Single System*);
- Pengawasan penangkapan ikan terukur (PIT);
- · Pengawasan importasi hasil perikanan;
- Pengawasan kegiatan budidaya ikan program prioritas nasional;
- Pengawasan pengelolaan komoditas lobster, kepiting, dan rajungan (LKR);
- Pengawasan insidental.

Target Kinerja ISK.3 "Indeks Pemeriksaan Pelaku Usaha Perikanan (Indeks)" berdasarkan Renstra dapat dilihat pada Tabel 12. berikut ini.

Tabel 12 Target Kinerja Komponen ISK.3 "Indeks Pemeriksaan Pelaku Usaha Perikanan (Indeks)"

Komponen Indikator	Target 2025 (Tahun Berjalan dan	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029
Sasaran Kinerja	Awal Periode Renstra)				
Pemeriksaan kepatuhan subsektor penangkapan ikan Pemeriksaan kepatuhan subsektor pembudidayaan ikan Pemeriksaan kepatuhan subsektor pembudidayaan ikan Pemeriksaan kepatuhan subsektor pengolahan ikan Pemeriksaan kepatuhan subsektor pengangkutan dan pemasaran	RKK 15 PU Ketaatan 100%	-	-	-	-
ikan					

Keterangan : RKK: Rencana Kerja Keuangan; ISK: Indikator Sasaran Kerja; T: Target; C: Capaian; PU: Pelaku Usaha

Pada tahun 2025, yang merupakan awal periode Renstra terdapat total target 15 pelaku usaha dengan tingkat ketaatan 100,00%. Adapun capaian kinerja ISK.3 pada Triwulan I Tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel 13. sebagai berikut:

Tabel 13 Hasil Capaian Kinerja Komponen ISK.3 "Indeks Pemeriksaan Pelaku Usaha Perikanan (Indeks)" Triwulan I Tahun 2025

Komponen	T۱	ΝI	20	25	Т	W I	20	26	Т	WΙ	202	7	Т	WΙ	202	8	T'	WΙ	202	9	
Indikator	Rk	ίK	IS	ίK	RI	Κ	15	SK	Rk	ίK	IS	K	Rk	Κ	IS	K	RK	ίK	IS	K	Persen
Sasaran																					
Kinerja	Т	С	Т	С	Т	C	Т	C	Т	С	Т	С	Т	C	Т	C	Т	С	Т	С	
Pemeriksaan kepatuhan subsektor penangkapan	_	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Komponen	T۱	ΝI	20	25	T	W I	20	26	Т	WΙ	202	.7	Т	WI	202	8	T'	W I	202	9	
Indikator	Rk	ίK	IS	SΚ	RI	Κ	15	SΚ	Rk	ίK	IS	K	Rŀ	Κ	IS	K	RK	ίK	IS	K	Persen
Sasaran	_	_	_	I	_	_	_	1 _			_	<u> </u>	_								
Kinerja	Т	С	T	С	T	С	Τ	С	Т	С	Т	С	Т	С	Т	С	T	С	Т	С	
ikan																					
Pemeriksaan kepatuhan subsektor pembudi dayaan ikan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pemeriksaan kepatuhan subsektor pengolahan ikan	1 PU			100 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pemeriksaan kepatuhan subsektor pengangkutan dan pemasaran ikan	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-

Keterangan : RKK: Rencana Kerja Keuangan; ISK: Indikator Sasaran Kerja; T: Target; C: Capaian; PU: Pelaku Usaha

Dari segi RKK, target jumlah pelaku usaha perikanan yang diperiksa pada Triwulan I Tahun 2025 sebesar 1 (satu) pelaku usaha dan tingkat ketaatan 100,00%. Realisasi Triwulan I Tahun 2025 sebesar 1 (satu) pelaku usaha dan tingkat ketaatan 100,00% dengan persentase pada aplikasi *Kinerjaku* sebesar 100,00% berpredikat "Baik". Adapun pelaku usaha yang diperiksa dengan objek penangkapan ikan terukur.

Apabila dibandingkan dengan capaian triwulan tahun-tahun sebelumnya, ISK tersebut tidak dapat dibandingkan, dikarenakan Tahun 2025 merupakan awal periode Renstra, sehingga belum terdapat target maupun capaian yang dapat dibandingkan. Dari segi jumlah pelaku usaha, pada Triwulan I Tahun 2025 telah mencapai target jumlah pelaku usaha perikanan yang diperiksa. Dari segi ketaatan, telah tercapai sesuai dengan target yang ditentukan.

Tercapainya target kinerja tersebut disebabkan beberapa kegiatan yang

dilaksanakan di Triwulan I Tahun 2025, antara lain sebagai berikut:

- Tersedianya petunjuk teknis pengawasan perikanan terbaru, antara lain:
 - Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2020 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan;
 - Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Standar Laik Operasi dan Sistem Pemantauan Kapal Perikanan;
 - Peraturan Direktur Jenderal PSDKP Nomor 6 Tahun 2021 tentang
 Petunjuk Teknis Pengawasan Usaha dan Produk Pada
 Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Bidang
 Perikanan.
- Penerapan Perjanjian Kerja Sama Pengawasan antara Dinas Perikanan Daerah Kepl. Sangihe dengan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;
- Kegiatan Supervisi pengawasan yang dilaksanakan sebagai upaya koordinasiantara Stasiun PSDKP Tahuna dan Satwas SDKP Talaud serta Wilker SDKP Salibabu serta dengan instansi terkait berjalan sangat baik;
- Sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang pengawasan sumber dayaperikanan kepada stakeholder;

Secara rinci capaian kinerja ISK.3 "Indeks Pemeriksaan Pelaku Usaha Perikanan (Indeks)" Triwulan I Tahun 2025 sebagai berikut:

1. Pemeriksaan Kepatuhan Subsektor Pengolahan Ikan

Komponen "Pengawasan Kepatuhan Subsektor Pengolahan Ikan" merupakan pemeriksaan Unit Pengolahan hasil perikanan pengawasan dilakukan melalui pengawasan rutin perizinan berusaha berbasis risiko, serta kesesuaian terhadap kegiatan operasional perikanan yang dilaksanakan. Pada Triwulan I Tahun 2025 telah tercapai sebesar 100,00% dari target 100,00%.

Persentase ini didapatkan karena telah melengkapi tahapan yang telah dipersyaratkan dari Manual Indikator Kinerja (IKU), yaitu: 1). Tahapan Persiapan (10%) yang terdiri dari Surat Tugas, Surat Pemberitahuan Kepada Pelaku Usaha dan Daftar Pertanyaan. 2). Tahapan Pemeriksaan (70%) yang terdiri dari Hasil Pengawasan dan Data Dukung. 3). Tahapan Pelaporan (20%) yang terdiri dari Laporan dan data dukung hasil pemeriksaan yang telah disampaikan sesuai dengan format Direktorat PPSDP. Apabila setiap pemeriksaan Unit Pengolahan Ikan telah memenuhi persyaratan tersebut maka capaiannya didapatkan sebesar 100%. Sementara itu, Unit Pengolahan Hasil Perikanan yang telah dilakukan pemeriksaan dapat dilihat pada Tabel 14. berikut ini.

Tabel 14 Pemeriksaan Kepatuhan Subsektor Pengolahan Ikan Lingkup Stasiun PSDKP Tahuna Triwulan I Tahun 2025

NO	NAMA PERUSAHAAN PERORANGAN	KODE KBLI	SUBSEKTOR	HASIL PEMERIKSAAN	KEPATUHAN PELAKU USAHA
1.	PT. Jassendo Sentosa Mandiri	10213	Pengolahan Hasil Perikanan	Dokumen SKP telah berakhir masa berlaku pada tanggal 20 Januari 2025, sehingga diberikan Sanksi Administrasi berupa Teguran I dan himbauan kepada penanggungjawab kegiatan untuk dapat segera melengkapi dokumen tersebut	Tidak taat dan diberikan sanksi administrasi berupa surat teguran I
Penjelas	an warna: TW I T	ahun 2025	TW II Tahun 2025	TW III Tahun 2025	TW IV Tahun 2025

Alokasi anggaran yang digunakan untuk mendukung tercapainya Sasaran Kinerja 2 "Terselenggaranya Pengawasan Sumber Daya Kelautan" dan Sasaran Kinerja 3 "Terselenggaranya Pengawasan Sumber Daya Perikanan" dialokasikan pada Kode Mata Anggaran Kegiatan 2352 dengan rincian masing-masing ISK dan komponen dapat dilihat pada Tabel 15. sebagai berikut.

Tabel 15 Realisasi Anggaran Sasaran Kerja 2 "Terselenggaranya Pengawasan Sumber Daya Kelautan" dan

Sasaran Kerja 3 "Terselenggaranya Pengawasan Sumber Daya Perikanan"

Kode	Sasaran Kerja / Indikator Kinerja / Komponen	Alokasi Anggaran Tahun 2025 (Rp)	Pagu Real	Realisasi TW I Tahun 2025 (Rp)	Persentase (%)
SK.2	Terselenggaranya Pengawasan Sumber Daya Kelautan	Rp. 124.747.000	Rp. 9.016.00	Rp. 0,-	-
ISK.2	Indeks Pemeriksaan Pelaku Usaha Kelautan (Indeks)	Rp. 124.747.000	Rp. 9.016.000	Rp. 0,-	-
SK.3	Terselenggaranya Pengawasan Sumber Daya Perikanan	Rp. 150.000.000	Rp. 15.000.000	Rp. 450.000	3.00%
ISK.3	Indeks Pemeriksaan Pelaku Usaha Perikanan (Indeks)	Rp. 150.000.000	Rp. 15.000.000	Rp. 450.000	3.00%

Penjelasan warna: Sasaran Kerja Indikator Sasaran Kinerja Komponen

Berdasarkan informasi pada tabel diatas dapat dilihat, alokasi anggaran SK.2 dan SK.3 Tahun 2025 sebesar Rp. 376.747.000,-. dengan pagu real sebesar Rp. 30.320.000,-. Berdasarkan perhitungan sampai dengan akhir Triwulan I Tahun 2025 telah terealisasi pagu real sebesar Rp. 1.050.000,- dengan persentase sebesar (3,46%).

Stasiun PSDKP Tahuna mendapatkan nilai 100,00% untuk capaian kinerja pada Sasaran Kegiatan 2 dan 3 pada Triwulan I Tahun 2025. Berdasarkan analisis terhadap pencapaian kinerja pada SK. 2 dan 3 dan analisis terhadap realisasi anggaran sudah tercapai dengan baik sesuai dengan yang telah direncanakan.



TERSELENGGARANYA OPERASI ARMADA PENGAWASAN SDKP SECARA EFEKTIF



Pencapaian Sasaran Kegiatan "Terselenggaranya operasi armada pengawasan SDKP secara efektif" pada Triwulan I Tahun 2025 belum terdapat target dan capaian yang ditentukan serta diidentifikasikan ke dalam 2 (dua) ISK, yaitu :

ISK. 4

Indeks Operasi Kapal Pengawas (Indeks)

ISK. 4 "Indeks opersi kapal pengawas" ditetapkan sebagai IKU dengan target indeks pada Tahun 2025 sebesar 92,00. Target Kinerja ISK.4 "Indeks operasi kapal pengawas" berdasarkan Renstra dapat dilihat pada Tabel 16. berikut ini:

Tabel 16 Target Kinerja Komponen ISK.4 "Indeks Operasi Kapal Pengawas"

Indikator Sasaran Kinerja	Target 2025 (Tahun Berjalan dan Awal Periode Renstra)	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029
Indeks Operasi Kapal Pengawas	Nilai Indeks 92,00	-	-	-	-

Berdasarkan informasi pada tabel diatas, ISK.4 "Indeks Operasi Kapal Pengawas" pada Tahun 2025 yang merupakan tahun berjalan dan awal periode Renstra terdapat target Indeks yang ditetapkan sebesar 92,00. Hingga akhir Triwulan I Tahun 2025, belum dapat dilakukan pengukuran dikarenakan periode pengukuran menggunakan periode tahunan. Adapun informasi dapat dilihat pada Tabel 17. berikut ini.

Tabel 17 Hasil Capaian ISK.4 "Indeks Operasi Kapal Pengawas" Triwulan I Tahun 2025

Indikator Sasaran	TWI	2025	TWI	2026	TWI	2027	TWI	2028	TW	1 2029	Persen
Kinerja	Т	С	Т	U	Т	С	Т	С	Т	С	
Indeks Operasi Kapal Pengawas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Berdasarkan Informasi pada tabel diatas, belum terdapat target maupun capaian kinerja pada Triwulan I Tahun 2025. Hal tersebut dikarenakan pengukuran pada ISK.4 dilakukan pada akhir tahun. Apabila dibandingkan dengan capaian pada tahun-tahun sebelumnya, belum dapat dibandingkan dikarenakan Tahun 2025 merupakan awal periode Renstra sehingga belum terdapat target maupun capaian yang dapat dibandingkan.



ISK.5 "Indeks Operasi Speedboat Pengawas" ditetapkan sebagai IKU dengan target indeks pada Tahun 2025 sebesar 92,00. Target Kinerja ISK.5 "Indeks operasi speedboat pengawas" berdasarkan Renstra dapat dilihat pada Tabel 18. berikut ini.

Tabel 18 Target ISK.5 "Indeks Operasi Speedboat Pengawas"

Indikator Sasaran Kinerja	Target 2025 (Tahun Berjalan dan Awal Periode Renstra)	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029
Indeks Kinerja Operasi Kapal Pengawas	Nilai Indeks 92,00	-	-	-	-

Berdasarkan informasi pada tabel diatas, ISK.5 "Indeks Operasi Speedboat Pengawas" pada Tahun 2025 yang merupakan tahun berjalan dan awal periode Renstra terdapat target Indeks yang ditetapkan sebesar 92,00. Hingga akhir Triwulan I Tahun 2025, belum dapat dilakukan pengukuran dikarenakan periode pengukuran menggunakan periode tahunan. Hingga akhir Triwulan I Tahun 2024, dilakukan pengukuran realisasi berdasarkan target yang telah ditentukan. Adapun informasi dapat dilihat pada **Tabel 19**. berikut ini.

Tabel 19 Hasil Capaian ISK.5 "Indeks Operasi Speedboat Pengawas"
Triwulan I Tahun 2025

Indikator Sasaran	TWI	2025	TWI	2026	TWI	2027	TWI	2028	TWI	2029	Persen
Kinerja	T	С	T	C	Т	С	Т	С	Т	С	
Indeks Operasi	-	_	_	-	-	-	-	-	-	-	-
Speedboat Pengawas											

Berdasarkan Informasi pada tabel diatas, belum terdapat target maupun capaian kinerja pada Triwulan I Tahun 2025. Hal tersebut dikarenakan pengukuran pada ISK.5 dilakukan pada akhir tahun. Apabila dibandingkan dengan capaian pada tahun-tahun sebelumnya, belum dapat dibandingkan

dikarenakan Tahun 2025 merupakan awal periode Renstra sehingga belum terdapat target maupun capaian yang dapat dibandingkan.

Alokasi anggaran yang digunakan untuk mendukung tercapainya Sasaran Kinerja 4. "Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP Secara Efektif" dialokasikan pada Kode Mata Anggaran Kegiatan 2350.QHD dengan rincian masing-masing ISK dapat dilihat pada Tabel 20. sebagai berikut.

Tabel 20 Realisasi Anggaran Sasaran Kerja 4. "Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP Yang Efektif"

		crasi / tirriada i crigav	vasan seki Te	ing Lickin		
Kode	Kode MAK	Sasaran Kerja / Indikator Kinerja / Variabel Pembentuk	Alokasi Anggaran Tahun 2025 (Rp)	Pagu Real (Rp)	Realisasi TW I Tahun 2025 (Rp)	Persentase (%)
SK.4	2350.QHD	Terselenggaranya operasi armada pengawasan SDKP yang efektif	6.930.075.000	1.794.126.000	223.797.900	12,47 %
ISK.4	2350.QHD.001	Indeks Operasi Kapal Pengawas	5.612.345.000	1.438.545.000	118.645.600	8,25 %
ISK.5	2350.QHD.003	Indeks Operasi Speedboat Pengawas	329.200.000	163.176.000	64.328.000	39,42 %
	Penjelasan warna	ı: Sasaran Kerja Indi	kator Sasaran Kinerja	Variabel Pe	embentuk	

Pada tabel diatas dapat dilihat, alokasi anggaran SK.4 Tahun 2025 sebesar Rp. 6.930.075.000,-. dan Pagu Real Anggaran sebesar Rp. 1.794.126.000 Berdasarkan perhitungan sampai dengan akhir Triwulan I Tahun 2025 telah terealisasi sebesar Rp. 223.797.900,- dengan persentase sebesar (12,47 %). Dengan rincian untuk ISK.4 menggunakan kode 2350.QHD.001 telah terealisasi sebesar Rp. 118.645.600,- dari alokasi anggaran pagu real Rp. 1.438.545.000,- dengan persentase sebesar 8,25%; dan ISK.5 telah terealisasi Rp. 64.328.000,- dari alokasi anggaran pagu real sebesar Rp. 163.176.000,- dengan persentase sebesar 39,42%. Berdasarkan analisis terhadap pencapaian kinerja pada SK.4 dan analisis terhadap realisasi anggaran, hingga akhir Triwulan I Tahun 2025 dapat disimpulkan cukup efisien dikarenakan target serapan anggaran yang sesuai dengan target.



TERSELENGGARANYA PEMBANGUNAN SERTA PERAWATAN SARANA DAN PRASARANA PENGAWASAN SDKP YANG SESUAI KETENTUAN

Pencapaian Sasaran Kegiatan "Terselenggaranya Pembangunan Serta Perawatan Sarana dan Prasarana Pengawasan SDKP Yang Sesuai Ketentuan" Triwulan I Tahun 2025 sebesar 100,00% berpredikat "Baik" dengan diidentifikasikan ke dalam 1 (satu) ISK, yaitu:



Persentase Pemeliharaan dan Perawatan Prasarana dan Sarana Pengawasan SDKP (%)

ISK.6 "Persentase Pemeliharaan dan Perawatan Prasarana dan Sarana Pengawasan SDKP" ditetapkan sebagai IKU, dengan target persentase pada Tahun 2025 sebesar 100,00%. Target Kinerja ISK.6 "Persentase Pemeliharaan dan Perawatan Prasarana dan Sarana Pengawasan SDKP" berdasarkan Renstra, adapun informasi dapat dilihat pada Tabel 21. berikut ini.

Tabel 21 Target ISK.6 "Persentase Pemeliharaan dan Perawatan Prasarana dan Sarana Pengawasan SDKP"

Indikator Sasaran Kinerja	Target 2025 (Tahun Berjalan dan Awal Periode Renstra)	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029
Persentase Pemeliharaan dan Perawatan Prasarana dan Sarana Pengawasan SDKP	100,00 %	-	-	-	-

Berdasarkan informasi pada tabel diatas, ISK.6 "Persentase" pada Tahun 2025 yang merupakan tahun berjalan dan awal periode Renstra terdapat target Indeks yang ditetapkan sebesar 92,00. Hingga akhir Triwulan I Tahun 2025, dilakukan pengukuran realisasi berdasarkan target yang telah ditentukan.

Adapun Informasi dapat dilihat pada Tabel 22. berikut ini.

Tabel 22 Hasil Capaian ISK.6 "Persentase Sarana dan Prasarana Pengawasan SDKP yang Diselesaikan" Triwulan I Tahun 2025

	9		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	···· · · · · · · · · · · · · · · · · ·							
Indikator Sasaran Kinerja		2025 entase)	TWI	2026	TWI	2027	TWI	2028	TWI	2029	Persen
	Т	С	T	С	Т	С	Т	С	Т	С	
Persentase Pemeliharaan dan Perawatan Prasarana dan Sarana Pengawasan SDKP	100,00 %	100,00 %	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00 %

Berdasarkan informasi pada tabel diatas, target yang ditetapkan pada Triwulan I Tahun 2025 dengan persentase 100,00% telah tercapai dengan persentase 100,00% dan persentase pada aplikasi *Kinerjaku* sebesar 100,00% berpredikat "Baik". Jika dibandingkan dengan capaian pada tahun sebelumnya, ISK tersebut tidak dapat dibandingkan, dikarenakan Tahun 2025 merupakan awal Periode Renstra. Indikator keberhasilan "Persentase Pemeliharaan dan Perawatan Prasarana dan Sarana Pengawasan SDKP" berdasarkan terlaksananya 3 (Tiga) kegiatan sebagai berikut:

- 1. Perawatan Preventif (Perawatan Preventif berupa pemeliharaan dan perawatan rutin, KP. Hiu. 15).
- 2. Perawatan Prediktif, dan
- 3. Perawatan Darurat.

Alokasi anggaran yang digunakan untuk mendukung tercapainya Sasaran Kinerja 5. "Terselenggaranya Pembangunan Serta Perawatan Sarana dan Prasarana Pengawasan SDKP Yang Sesuai Ketentuan" dialokasikan pada Kode Mata Anggaran Kegiatan 2350 CBQ & RCG dengan rincian masing-masing ISK dapat dilihat pada Tabel 23. sebagai berikut.

Tabel 23 Realisasi Anggaran Sasaran Kerja 5. "Terselenggaranya Pembangunan Serta Perawatan Sarana dan Prasarana SDKP yang Sesuai Ketentuan"

Kode	Kode MAX	Sasaran Kerja / Indikator Kinerja / Variabel Pembentuk	Alokasi Anggaran Tahun 2025 (Rp)	Pagu Real (Rp)	Realisasi TW I Tahun 2025 (Rp)	Persentase (%)
SK.5	2350.RCG	Terselenggaranya Pembangunan Serta Perawatan Sarana dan Prasarana Pengawasan SDKP Yang Sesuai Ketentuan	Rp. 988.530.000	Rp. 192.405.000	Rp. 40.824.300	21,22 %
ISK.6	2350.RCG.001	Persentase Pemeliharaan Perawatan Sarana pengawasan SDKP	RP. 988.530.000	RP. 192.405.000	RP. 40.824.300	21,22 %

Penjelasan warna: Sasaran Kerja Indikator Sasaran Kinerja Variabel Pembentuk

Pada tabel diatas dapat dilihat, alokasi anggaran SK.5 Tahun 2025 sebesar Rp. 988.530.000,-. dan pagu real sebesar Rp. 192.405.000 Berdasarkan perhitungan hingga akhir Triwulan I Tahun 2025 telah terealisasi sebesar Rp. 40.824.300,- dengan persentase sebesar (21,22%).



TERSELENGGARANYA PENANGANAN PELANGGARAN
ADMINISTRATIF BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
YANG EFEKTIF DAN SESUAI KETENTUAN

Pencapaian Sasaran Kegiatan "Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran Bidang Kelautan dan Perikanan yang Tuntas" pada Triwulan I Tahun 2025 belum terdapat target dan capaian yang ditentukan serta diidentifikasikan ke dalam 1 (Satu) ISK, yaitu :



" Indeks Pengenaan Sanksi Administratif Bidang kelautan dan Perikanan"

ISK.7 "Indeks pengenaan sanki administratif bidang kelautan dan perikanan" ditetapkan sebagai IKU dengan target Indeks pada tahun 2024 sebesar 81. Adapun informasi dapat dilihat pada Tabel 24. berikut ini.

Tabel 24
Target ISK.7 "Indeks Pengenaan Sanki Administratif Bidang Kelautan dan Perikanan" Tahun 2025

Indikator Sasaran Kinerja	Target 2025 (Tahun Berjalan dan Awal Periode Renstra)		Target 2027	Target 2028	Target 2029
Persentase pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan lingkup Stasiun PSDKP Tahuna	81,00 (Indeks)	-	-	-	-

Berdasarkan informasi pada tabel diatas, ISK.7 "Indeks Pengenaan Sanksi Administratif Bidang Kelautan dan Perikanan" pada Tahun 2025 yang merupakan tahun berjalan dan awal periode Renstra terdapat target Indeks yang ditetapkan sebesar 92,00. Hingga akhir Triwulan I Tahun 2025, belum dapat dilakukan pengukuran dikarenakan periode pengukuran menggunakan periode tahunan. Adapun informasi dapat dilihat pada **Tabel 25**. berikut ini.

Tabel 25
Hasil Capaian ISK.7 "Indeks Pengenaan Sanki Administratif Bidang
Kelautan dan Perikanan" Triwulan I Tahun 2025

Indikator Sasaran Kinerja	(N	2025 ilai eks)	TWI	2026	TWI	2027	TWI	2028	TWI	2029	Nilai Indeks
manator susurum ninerju	T	С	T	С	T	С	Т	C	Т	C	Titla Macks
Indeks Pengenaan Sanksi Administratif Bidang Kelautan dan Perikanan (Indeks)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Berdasarkan Informasi pada tabel diatas, belum terdapat target maupun capaian kinerja pada Triwulan I Tahun 2025. Hal tersebut dikarenakan pengukuran pada ISK.7 dilakukan pada periode Semesteran. Apabila dibandingkan dengan capaian pada tahun-tahun sebelumnya, belum dapat dibandingkan dikarenakan Tahun 2025 merupakan awal periode Renstra

sehingga belum terdapat target maupun capaian yang dapat dibandingkan.

Alokasi anggaran yang digunakan untuk mendukung tercapainya Sasaran Kinerja 6 "Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran Administratif Bidang Kelautan dan Perikanan Yang Efektif dan Sesuai Ketentuan" dialokasikan pada Kode Mata Anggaran Kegiatan 2351 dengan rincian masing-masing ISK dan komponen dapat dilihat pada Tabel 26. sebagai berikut.

Tabel 26 Realisasi Anggaran Sasaran Kerja 6. "Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran Administratif Bidang Kelautan Dan Perikanan Yang Efektif dan Sesuai ketentuan"

Kode	Sasaran Kerja / Indikator Kinerja / Komponen	Alokasi Anggaran Tahun 2025 (Rp)	Pagu Real (Rp)	Realisasi TW I Tahun 2025 (Rp)	Persentase (%)
SK.5	Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran Bidang Kelautan dan Perikanan Yang Tuntas	Rp. 196.455.000	Rp. 31.606.000	Rp. 18.120.712	57,33
ISK.7	Indeks Pengenaan Sanksi Administratif Bidang Kelautan dan Perikanan	Rp. 30.080.000	-	-	-

Penjelasan warna: Sasaran Kerja Indikator Sasaran Kinerja Komponen

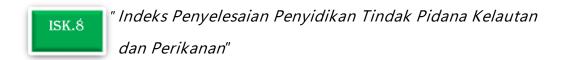
Pada tabel diatas dapat dilihat, alokasi anggaran SK.5 Tahun 2025 sebesar Rp.196.455.000,-. dan pagu real sebesar Rp. 31.606.000 Berdasarkan perhitungan sampai dengan akhir Triwulan I Tahun 2025 telah terealisasi sebesar Rp. 18.120.712 dari alokasi anggaran Rp. 31.606.000 dengan persentase sebesar 57,33%.

Berdasarkan analisis terhadap pencapaian kinerja pada SK.5 dan analisis terhadap realisasi anggaran sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan apa yang telah direncanakan.



TERSELENGGARANYA PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KELAUTAN DAN PERIKANAN YANG BERKUALITAS

Pencapaian Sasaran Kegiatan "Terselenggaranya Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan Yang Efektif dan Sesuai Ketentuan" pada Triwulan I Tahun 2025 belum terdapat target dan capaian yang ditentukan serta diidentifikasikan ke dalam 1 (Satu) ISK, yaitu :



ISK.8 "Indeks Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan" ditetapkan sebagai IKU dengan target nilai Indeks pada tahun 2025 sebesar 94,00. Adapun informasi dapat dilihat pada Tabel 27. berikut ini.

Tabel 27Target ISK.8 "Indeks Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan"

Indikator Sasaran Kinerja	Tahun 2025 (Tahun Berjalan dan Awal Periode Renstra)	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029
Indeks Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan	94,00 (Nilai Indeks)	-	-	-	-

Berdasarkan informasi pada tabel diatas, ISK.8 "Indeks Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan" pada Tahun 2025 yang merupakan tahun berjalan dan awal periode Renstra terdapat target Indeks yang ditetapkan sebesar 94,00. Hingga akhir Triwulan I Tahun 2025, belum dapat dilakukan pengukuran dikarenakan periode pengukuran menggunakan periode tahunan. Adapun informasi dapat dilihat pada **Tabel 28**. berikut ini.

Tabel 28 Hasil Capaian ISK.8 "Indeks Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan" Triwulan I Tahun 2025

Indikator Sasaran	TW I	2025	TW I	2026	TW I	2027	TW I	2028	TW I	2029	Persen
Kinerja	Т	С	Т	C	Т	С	Т	C	Т	C	
Indeks Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Berdasarkan Informasi pada tabel diatas, belum terdapat target maupun capaian kinerja pada Triwulan I Tahun 2025. Hal tersebut dikarenakan pengukuran pada ISK.8 dilakukan pada periode Semesteran. Apabila dibandingkan dengan capaian pada tahun-tahun sebelumnya, belum dapat dibandingkan dikarenakan Tahun 2025 merupakan awal periode Renstra sehingga belum terdapat target maupun capaian yang dapat dibandingkan

Alokasi anggaran yang digunakan untuk mendukung tercapainya Sasaran Kinerja 7. "Terselenggaranya Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan Yang Berkualitas" dialokasikan pada Kode Mata Anggaran Kegiatan 2351.BCE.U04 dengan rincian masing-masing ISK dan komponen dapat dilihat pada Tabel 29. sebagai berikut :

Tabel 29 Realisasi Anggaran Sasaran Kinerja 6. "Terselenggaranya Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan Yang Berkualitas"

Kode	Sasaran Kerja / Indikator Kinerja / Komponen	Alokasi Anggaran Tahun 2025 (Rp)	Pagu Real (Rp)	Realisasi TW I Tahun 2025 (Rp)	Persentase (%)
SK.7	Terselenggaranya Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan Yang Berkualitas	Rp. 116.375.000	Rp. 31.606.000	Rp. 18.120.712	57,33%
ISK.8	Indeks Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan	Rp. 116.375.000	Rp. 31.606.000	Rp. 18.120.712	57,33%

Penjelasan warna: Sasaran Kerja Indikator Sasaran Kinerja

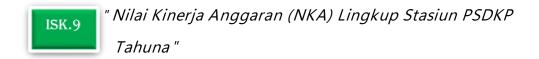
Pada tabel diatas dapat dilihat, alokasi anggaran SK.7 Tahun 2025 sebesar Rp. 116.375.000,- dan pagu anggaran real sebesar Rp. 31.606.000. Berdasarkan perhitungan realisasi sampai dengan akhir Triwulan I Tahun 2025 telah terealisasi sebesar Rp. 18.120.712,- dengan persentase sebesar (57,33%). Dengan rincian untuk ISK.8 telah terealisasi Rp 18.120.712,- dari alokasi anggaran real Rp. 31.606.000,- dengan persentase 57,33%.

Berdasarkan analisis terhadap pencapaian kinerja pada SK.7 dan analisis terhadap realisasi anggaran dapat disimpulkan cukup efisien dikarenakan target capaian terlaksana dengan baik dan serapan anggaran yang sesuai dengan target.



TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG EFEKTIF,
LINCAH DAN AKUNTABEL DALAM PENGAWASAN
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN

Pencapaian Sasaran Kegiatan "Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Lincah dan Akuntabel dalam Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan" pada Triwulan I Tahun 2025 sebesar 103,31% berpredikat "Baik" dengan diidentifikasikan ke dalam 11 (Sebelas) ISK, yaitu:



ISK.9 "Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Lingkup Stasiun PSDKP Tahuna" ditetapkan sebagai IKM, dengan target nilai pada Tahun 2025 sebesar 71,50. Adapun informasi dapat dilihat pada Tabel 30. berikut ini.

Tabel 30
Target ISK.9 "Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Satker
Stasiun PSDKP Tahuna"

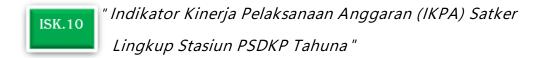
Indikator Sasaran Kinerja	Target 2025 (Tahun Berjalan dan Awal Periode Renstra)	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029
Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Lingkup Stasiun PSDKP Tahuna	71,50 (Nilai)	-	-	-	-

Berdasarkan informasi pada tabel diatas, ISK.9 "Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) " pada Tahun 2025 yang merupakan tahun berjalan dan awal periode Renstra terdapat target Indeks yang ditetapkan sebesar 71,50. Hingga akhir Triwulan I Tahun 2025, belum dapat dilakukan pengukuran dikarenakan periode pengukuran menggunakan periode tahunan. Adapun informasi dapat dilihat pada **Tabel 31**. berikut ini.

Tabel 31 Hasil Capaian ISK.9 "Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Lingkup Stasiun PSDKP Tahuna" Triwulan I Tahun 2025

Indikator Sasaran	TW I	2025	TW I	2026	TW I	2027	TW I	2028	TW I	2029	Persen
Kinerja	Т	C	Т	C	Т	C	Т	C	Т	С	
Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Satker Stasiun PSDKP Tahuna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Berdasarkan informasi pada tabel diatas, belum terdapat target maupun capaian kinerja pada Triwulan I Tahun 2025. Hal tersebut dikarenakan periode pengukuran kinerja pada ISK.9 dilakukan pada akhir tahunan. Apabila dibandingkan dengan capaian pada triwulan tahun-tahun sebelumnya, belum dapat dibandingkan dikarenakan belum terdapat target yang ditentukan maupun capaian yang diperoleh. Indikator keberhasilan ISK tersebut diukur dari capaian komponen kinerja, penyerapan, konsistensi, CRO, efisiensi, dan nilai efisiensi.



ISK.10 "Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satker Lingkup Stasiun PSDKP Tahuna" ditetapkan sebagai IKM, dengan target nilai pada Tahun 2025 sebesar 92,00. Adapun informasi dapat dilihat pada Tabel 32. berikut ini.

Tabel 32
Target ISK.10 "Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup
Stasiun PSDKP Tahuna"

Indikator Sasaran	Target 2025	Target	Target	Target	Target
Kinerja	(Tahun Berjalan)	2026	2027	2028	2029
Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satker Lingkup Stasiun PSDKP Tahuna	92,00 (Nilai)	-	-	-	-

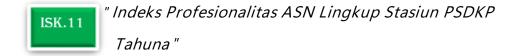
Berdasarkan informasi pada tabel diatas, ISK.10 "Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satker Lingkup Stasiun PSDKP Tahuna" pada Tahun 2025 yang merupakan tahun berjalan dan awal periode Renstra terdapat target Indeks yang ditetapkan sebesar 92,00. Hingga akhir Triwulan I Tahun 2025, belum dapat dilakukan pengukuran dikarenakan periode pengukuran menggunakan periode tahunan. Adapun informasi dapat dilihat pada **Tabel 33**. berikut ini.

Tabel 33 Hasil Capaian ISK.10 "Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satker Lingkup Stasiun PSDKP Tahuna" Triwulan I Tahun 2025

	J - 11						•				
	TW I	2025	TW I	2026	TW I	2027	TW I	2028	TW I	2029	Persen
Indikator Sasaran Kinerja	Т	С	Т	С	Т	С	Т	C	Т	С	
Nilai Indikator Kinerja											
Pelaksanaan Anggaran											
(IKPA) Satker Lingkup	_	_	_	_	-	_	-	-	-	_	-
Stasiun PSDKP Tahuna											

Berdasarkan informasi pada tabel diatas, belum terdapat target maupun capaian kinerja pada Triwulan I Tahun 2025. Hal tersebut dikarenakan periode pengukuran kinerja pada ISK.10 dilakukan pada akhir semesteran. Apabila dibandingkan dengan capaian pada triwulan tahun-tahun sebelumnya, belum dapat dibandingkan dikarenakan belum terdapat target yang ditentukan maupun capaian yang diperoleh.

Indikator keberhasilan ISK tersebut adalah kualitas perencanaan anggaran dengan baik, kualitas pelaksanaan anggaran dengan baik, serta kualitas hasil pelaksanaan anggaran yang baik.



ISK.11 "Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Stasiun PSDKP Tahuna" ditetapkan sebagai IKM, dengan target nilai Indeks pada Tahun 2025 sebesar 81,00. Adapun informasi dapat dilihat pada Tabel 34. berikut ini.

Tabel 34
Target ISK.11 "Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Stasiun PSDKP
Tahuna"

Indikator Sasaran	Target 2025	Target	Target	Target	Target
Kinerja	(Tahun Berjalan)	2026	2027	2028	2029
Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Stasiun PSDKP Tahuna	81,00	-	-	1	-

Berdasarkan informasi pada tabel diatas, ISK.11 "Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Stasiun PSDKP Tahuna" pada Tahun 2025 yang merupakan tahun berjalan dan awal periode Renstra terdapat target Indeks yang ditetapkan sebesar 81,00. Hingga akhir Triwulan I Tahun 2025, belum dapat dilakukan pengukuran dikarenakan periode pengukuran menggunakan periode Semesteran. Adapun informasi dapat dilihat pada **Tabel 35**. berikut ini.

Tabel 35
Hasil Capaian ISK.11 "Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Stasiun
PSDKP Tahuna" Triwulan I Tahun 2025

Indikator Sasaran	TW I	2025	TW I	2026	TW I	2027	TW I	2028	TW I	2029	<mark>Persen</mark>
Kinerja	Т	С	Т	U	Т	С	Т	C	Т	С	
Indeks Profesionalitas											
ASN Lingkup Stasiun	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PSDKP Tahuna											

Berdasarkan informasi pada tabel diatas, belum terdapat target maupun capaian kinerja pada Triwulan I Tahun 2025. Hal tersebut dikarenakan periode pengukuran kinerja pada ISK.11 dilakukan pada akhir semesteran. Apabila dibandingkan dengan capaian pada triwulan tahun-tahun sebelumnya, belum dapat dibandingkan dikarenakan belum terdapat target yang ditentukan maupun capaian yang diperoleh. Pada Tahun 2025 yang merupakan tahun berjalan dan awal periode Renstra, terdapat target capaian nilai yang ditentukan sebesar 81,00 dan diharapkan dapat tercapai dengan baik.

Indikator keberhasilan ISK tersebut diukur berdasarkan aktifnya peran pegawai Stasiun PSDKP Tahuna dalam mengikuti beberapa kegiatan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, seminar, dan workshop baik terkait tugas pokok maupun tugas tambahan dari masing-masing pegawai.



ISK.12 "Penilaian Mandiri SAKIP Stasiun PSDKP Tahuna" ditetapkan sebagai IKM dengan target nilai pada tahun 2025 sebesar 88,00. Target Kinerja "Penilaian Mandiri SAKIP Stasiun PSDKP Tahuna" berdasarkan Renstra dapat dilihat pada tabel 36. berikut ini.

Tabel 36 Target ISK.12 "Penilaian Mandiri SAKIP Stasiun PSDKP Tahuna"

Indikator Sasaran Kinerja	Target 2025 (Tahun Berjalan dan Awal Periode Renstra)	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029
Penilaian Mandiri SAKIP Stasiun PSDKP Tahuna	88,00 (Nilai)	-	-	-	-

Berdasarkan informasi pada tabel diatas, ISK.12 "Penilaian Mandiri SAKIP Stasiun PSDKP Tahuna" pada Tahun 2025 yang merupakan tahun berjalan dan awal periode Renstra terdapat target Indeks yang ditetapkan sebesar 81,00. Hingga akhir Triwulan I Tahun 2025, belum dapat dilakukan pengukuran dikarenakan periode pengukuran menggunakan periode Semesteran. Adapun informasi dapat dilihat pada **Tabel 37**. berikut ini

Tabel 37
Hasil Capaian ISK.12 "Penilaian Mandiri SAKIP Stasiun PSDKP Tahuna"
Triwulan I Tahun 2025

Indikator Sasaran	TW I	2025	TW I	2026	TW I	2027	TW I	2028	TW I	2029
Kinerja	Т	С	Т	C	Т	C	Т	C	Т	С
Penilaian Mandiri SAKIP Stasiun PSDKP	_	_	-	_	_	-	_	_	-	
Tahuna										

Berdasarkan informasi pada tabel diatas, belum terdapat target maupun capaian kinerja pada Triwulan I Tahun 2025. Hal tersebut dikarenakan periode pengukuran kinerja pada ISK.12 "Penilaian Mandiri SAKIP Stasiun PSDKP Tahuna" dilakukan pada akhir tahun. Apabila dibandingkan dengan capaian pada triwulan tahun-tahun sebelumnya, belum dapat dibandingkan dikarenakan belum terdapat target yang ditentukan maupun capaian yang diperoleh. Pada Tahun 2025 yang merupakan tahun berjalan dan awal periode Renstra, terdapat target capaian nilai yang ditentukan sebesar 88,00 dan diharapkan dapat tercapai dengan baik.



" Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan Berbasis Manajemen Risiko Lingkup Stasiun PSDKP Tahuna"

ISK.13 "Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan Berbasis Manajemen Risiko Lingkup Stasiun PSDKP Tahuna" ditetapkan sebagai IKM, dengan target persentase pada Tahun 2025 sebesar 100,00%. Adapun informasi dapat dilihat pada Tabel 38. berikut ini.

Tabel 38
Target ISK.13 "Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan Berbasis
Manajemen Risiko lingkup Stasiun PSDKP Tahuna"

Indikator Sasaran Kinerja	Target 2025 (Tahun Berjalan dan Awal Periode Renstra)	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029
Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan Berbasis Manajemen Risiko Lingkup Stasiun PSDKP Tahuna	100,00 %	-	-	-	-

Berdasarkan informasi pada tabel diatas, ISK.13 "Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan Berbasis Manajemen Risiko Lingkup Stasiun PSDKP Tahuna" pada Tahun 2025 yang merupakan tahun berjalan dan awal periode Renstra terdapat target Indeks yang ditetapkan sebesar 81,00. Adapun informasi dapat dilihat pada **Tabel 39**. berikut ini

Tabel 39
Hasil Capaian ISK.13 "Persentase Pelaksanaan Pengendalian
Kegiatan Berbasis Manajemen Risiko Lingkup Stasiun PSDKP Tahuna"
Triwulan I Tahun 2025

Indikator Sasaran	TW I	2025	TW I	2026	TW I	2027	TW I	2028	TW I	2029	Persen
Kinerja	T	С	Т	C	Т	С	Т	C	Т	С	
Persentase											
Pelaksanaan											
Pengendalian											
Kegiatan Berbasis	100%	100%	-	_	-	-	-	-	-	-	100%
Manajemen Risiko											
Lingkup Stasiun											
PSDKP Tahuna											

Berdasarkan informasi pada tabel diatas, capaian pada Triwulan I Tahun 2025 mendapat persentase 100,00% dari target persentase 100,00% dengan persentase pada aplikasi *Kinerjaku* sebesar 100,00% berpredikat "Baik". Apabila dibandingkan dengan triwulan tahun-tahun sebelumnya, belum dapat dibandingkan dikarenakan tahun 2025 merupakan awal periode Renstra. Pada Triwulan I Tahun 2025 ISK.13 "Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan Berbasis Manajemen Risiko Lingkup Stasiun PSDKP Tahuna" memiliki capaian yang berpredikat "Baik" yang berarti mendapatkan nilai yang sesuai dengan target yang telah ditentukan.

Indikator keberhasilan ISK tersebut adalah dengan telah dilakukan penilaian pemilik risiko dan ditindaklanjutinya seluruh rekomendasi tindak lanjut risiko yang terdapat pada matriks manajemen risiko.



" Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup Stasiun PSDKP Tahuna yang Dokumen Tindak Lanjutnya Telah Dilengkapi dan Disampaikan"

ISK.14 "Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup Stasiun PSDKP Tahuna yang Dokumen Tindak Lanjutnya Telah Dilengkapi dan Disampaikan" ditetapkan sebagai IKM, dengan target persentase pada Tahun 2025 sebesar 95,00%. Adapun informasi dapat dilihat pada Tabel 40. berikut ini.

Tabel 40
Target ISK.14 "Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup
Stasiun PSDKP Tahuna yang Dokumen Tindak Lanjutnya Telah
Dilengkapi dan Disampaikan"

Indikator Sasaran Kinerja	Target 2025 (Tahun Berjalan dan Awal Periode Renstra)	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029
Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup Stasiun PSDKP Tahuna	95,00 %	1	-	-	-

yang Dokumen Tindak			
Lanjutnya Telah			
Dilengkapi dan			
Disampaikan			

Pada Tahun 2025, yang merupakan tahun berjalan dan awal periode Renstra terdapat target persentase yang ditetapkan sebesar 95,00%. Adapun informasi dapat dilihat pada Tabel 41. berikut ini.

Tabel 41
Hasil Capaian ISK.14 "Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil
Pengawasan Lingkup Stasiun PSDKP Tahuna yang Dokumen Tindak
Lanjutnya Telah Dilengkapi dan Disampaikan" Triwulan I Tahun 2025

Indikator Sasaran	TW I	2025	TW I	2026	TW I	2027	TW I	2028	TW I	2029	Persen
Kinerja	Т	С	Т	C	Т	C	Т	C	Т	С	
Persentase Jumlah											
Rekomendasi Hasil											
Pengawasan Lingkup											
Stasiun PSDKP Tahuna	0.50/	100%									100 000/
yang Dokumen Tindak	95%	100%	_	_	-	_	_	_	_	_	100,00%
Lanjutnya Telah											
Dilengkapi dan											
Disampaikan											

Berdasarkan tabel diatas pada Triwulan I Tahun 2025 didapatkan capaian persentase sebesar 100,00% dari target persentase sebesar 95,00% dengan persentase pada aplikasi *Kinerjaku* sebesar 105,26% berpredikat "Baik". Perhitungan ini didapatkan dari perhitungan jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti. Pada Triwulan I Tahun 2025 terdapat rekomendasi yang perlu ditindaklanjuti dan telah diselesaikan dengan demikian persentase sesuai dengan target sebagaimana yang dijelaskan dalam manual IKU.

Apabila dibandingkan dengan capaian triwulan tahun-tahun sebelumnya, belum dapat dibandingkan dikarenakan tahun 2025 merupakan awal periode Renstra. Diharapkan pada Triwulan tahun berikutnya dapat tercapai sesuai dengan target yang telah ditentukan.



"Nilai Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan Publik Unit Kerja Lingkup Stasiun PSDKP Tahuna"

ISK.15 "Nilai Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan Publik Unit Kerja Lingkup Stasiun PSDKP Tahuna" ditetapkan sebagai IKM, dengan target Nilai pada Tahun 2025 sebesar 88,50. Adapun informasi dapat dilihat pada Tabel 42. berikut ini.

Tabel 42Target ISK.15 "Nilai Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan Publik
Unit Kerja Lingkup Stasiun PSDKP Tahuna"

Indikator Sasaran Kinerja	Target 2025 (Tahun Berjalan dan Awal Periode Renstra)	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029
Nilai Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan Publik Unit Kerja Lingkup Stasiun PSDKP Tahuna	85,00	-	-	1	-

Pada Tahun 2025, yang merupakan tahun berjalan dan awal periode Renstra terdapat target Nilai sebesar 85,00. Adapun informasi dapat dilihat pada Tabel 43. berikut ini.

Tabel 43 Hasil Capaian ISK.15 " Indeks Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan Publik Lingkup Stasiun PSDKP Tahuna" Triwulan I Tahun 2025

Indikator Sasaran	TW I	2025	TW I	2026	TW I	2027	TW I	2028	TW I	2029	Persen
Kinerja	Т	С	Т	C	Т	C	Т	C	Т	С	
Indeks Kepuasan											
Masyarakat											
Pengguna Layanan											
SLO Kapal	88,50	91,67	-	-	-	-	-	-	-	-	103,58%
Perikanan Lingkup											
Stasiun PSDKP											
Tahuna											

Berdasarkan tabel diatas pada Triwulan I Tahun 2025 didapatkan capaian Indeks sebesar 91,67 dari target indeks sebesar 88,00 dengan persentase pada

aplikasi *Kinerjaku* sebesar 103,58% berpredikat "Baik". Perhitungan ini didapatkan melalui Survei Kepuasan Masyarakat yang dilaksanakan pada Triwulan I Tahun 2025 di Stasiun PSDKP Tahuna yang dihitung melalui hasil survei dari penerima layanan SLO Kapal Perikanan lingkup Stasiun PSDKP Tahuna dengan jumlah 15 (lima belas) responden.

Apabila dibandingkan dengan capaian triwulan tahun-tahun sebelumnya belum dapat dibandingkan, dikarenakan tahun 2025 merupakan awal periode Renstra. Diharapkan pada tahun berikutnya dapat mencapai nilai yang sesuai dengan target ataupun melebihi target yang telah ditentukan.



" Nilai Minimal Yang Dipersyaratkan Untuk Membangun Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) Unit Kerja Lingkup Stasiun PSDKP Tahuna"

ISK.16 "Nilai Minimal Yang Dipersyaratkan Untuk Membangun Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) Unit Kerja Lingkup Stasiun PSDKP Tahuna" ditetapkan sebagai IKM, dengan target nilai pada Tahun 2025 sebesar 80,00. Adapun informasi dapat dilihat pada Tabel 44. berikut ini.

Tabel 44
Target ISK. 16 "Nilai Minimal Yang Dipersyaratkan Untuk Membangun Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK)
Stasiun PSDKP Tahuna"

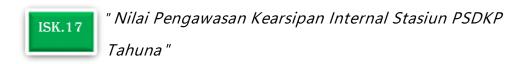
Indikator Sasaran Kinerja	Target 2025 (Tahun Berjalan dan Awal Periode Renstra)	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029
Nilai Minimal Yang Dipersyaratkan Untuk Membangun Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) Stasiun PSDKP Tahuna	80,00	-	-	-	-

Pada Tahun 2025, yang merupakan tahun berjalan dan awal periode Renstra terdapat target nilai yang ditetapkan sebesar 80,00. Adapun informasi dapat dilihat pada Tabel 45. berikut ini.

Tabel 45 Hasil Capaian ISK. 16 "Nilai Minimal yang Dipersyaratkan Untuk Membangun Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (Wbk) Stasiun Psdkp Tahuna" Triwulan I Tahun 2025

Indikator Sasaran	TW I	2025	TW I	2026	TW I	2027	TW I	2028	TW I	2029	Persen
Kinerja	Т	С	Т	С	T	С	Т	С	Т	С	
Nilai Minimal Yang Dipersyaratkan Untuk Membangun Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) Stasiun PSDKP Tahuna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Berdasarkan informasi pada tabel diatas, belum terdapat target maupun capaian kinerja pada Triwulan I Tahun 2025. Hal tersebut dikarenakan periode pengukuran kinerja pada ISK.16 dilakukan pada akhir tahun. Apabila dibandingkan dengan capaian pada triwulan tahun-tahun sebelumnya, belum dapat dibandingkan dikarenakan tahun 2025 merupakan awal periode Renstra.



ISK.17 "Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Stasiun PSDKP Tahuna" ditetapkan sebagai IKM, dengan target nilai pada Tahun 2025 sebesar 80,00. Adapun informasi dapat dilihat pada Tabel 46. Berikut ini.

Tabel 46
Target ISK.17 "Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Stasiun PSDKP
Tahuna"

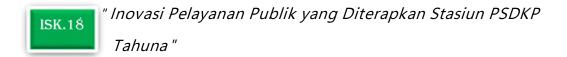
Indikator Sasaran Kinerja	Target 2025 (Tahun Berjalan dan Awal Periode Renstra)	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029
Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Stasiun PSDKP Tahuna	80,00	-	-	-	-

Berdasarkan informasi pada tabel diatas, ISK.17 "Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Stasiun PSDKP Tahuna" pada Tahun 2025 yang merupakan tahun berjalan dan awal periode Renstra terdapat target nilai yang ditetapkan sebesar 80,00. Adapun informasi dapat dilihat pada Tabel 47. berikut ini.

Tabel 47 Hasil Capaian ISK.17 "Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Stasiun PSDKP Tahuna" Triwulan I Tahun 2025

Indikator Sasaran	TW I	2025	TW I	2026	TW I	2027	TW I	2028	TW I	2029	Persen
Kinerja	Т	С	Т	C	T	С	Т	C	T	С	
Nilai Pengawasan											
Kearsipan											
Internal Stasiun	_	_	-	_	-	_	_	-	_	_	-
PSDKP Tahuna											

Berdasarkan informasi pada tabel diatas, belum terdapat target maupun capaian kinerja pada Triwulan I Tahun 2025. Hal tersebut dikarenakan periode pengukuran kinerja pada ISK.17 dilakukan pada akhir tahun. Apabila dibandingkan dengan capaian pada triwulan tahun-tahun sebelumnya, belum dapat dibandingkan dikarenakan tahun 2025 merupakan awal periode Restra, sehingga belum terdapat target maupun capaian yang dapat dibandingkan.



ISK.18 "Inovasi Pelayanan Publik Yang Diterapkan Pada Unit Kerja Stasiun PSDKP Tahuna" ditetapkan sebagai IKM, dengan target pada Tahun 2024 sebesar 1,00 unit. Adapun informasi dapat dilihat pada Tabel 48. berikut ini.

Tabel 48
Target ISK.18 "Inovasi Pelayanan Publik yang Diterapkan Stasiun PSDKP Tahuna"

Indikator Sasaran Kinerja	Target 2025 (Tahun Berjalan dan Awal Periode Renstra)	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029
Inovasi Pelayanan Publik yang Diterapkan Stasiun PSDKP Tahuna	1,00 unit	-	-	-	-

Berdasarkan informasi pada tabel diatas, ISK.18 "Inovasi Pelayanan Publik yang Diterapkan Stasiun PSDKP Tahuna" pada Tahun 2025 yang merupakan tahun berjalan dan awal periode Renstra terdapat target yang ditetapkan sebesar 1,00 Unit. Adapun informasi dapat dilihat pada Tabel 49. berikut ini.

Tabel 49
Hasil Capaian ISK. 18 "Inovasi Pelayanan Publik yang Diterapkan
Stasiun PSDKP Tahuna" Triwulan I Tahun 2025

Indikator Sasaran	TW I	2025	TW I	2026	TW I	2027	TW I	2028	TW I	2029	Persen
Kinerja	Т	C	Т	C	Т	C	Т	C	Т	С	
Inovasi Pelayanan											
Publik yang											
Diterapkan Stasiun	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PSDKP Tahuna											

Berdasarkan informasi pada tabel diatas, belum terdapat target maupun capaian kinerja pada Triwulan I Tahun 2025. Hal tersebut dikarenakan periode pengukuran kinerja pada ISK.18 dilakukan pada akhir tahun. Apabila dibandingkan dengan capaian pada triwulan tahun-tahun sebelumnya, belum

dapat dibandingkan dikarenakan tahun 2025 merupakan awal periode Renstra, sehingga belum terdapat target maupun capaian yang dapat dibandingkan.

Indikator keberhasilan ISK tersebut diukur dari jumlah inovasi yang berhasil disusun dan berpartisipasi dalam lomba inovasi lingkup Ditjen PSDKP. Inovasi yang diusulkan dapat berupa inovasi pelayanan publik ataupun manajemen internal pelayanan perkantoran yang dapat memberikan nilai positif bagi pelayanan publik ataupun manajemen perkantoran.

ISK.19 " Nilai Implementasi Program Budaya Kerja "

ISK.19 "Nilai Implementasi Program Budaya Kerja" ditetapkan sebagai IKM, dengan target nilai pada Tahun 2025 sebesar 70,00. Adapun informasi dapat dilihat pada Tabel 50. berikut ini.

Tabel 50 Target ISK.19 "Nilai Implementasi Program Budaya Kerja"

Indikator Sasaran	Target 2025 (Tahun Berjalan	Target	Target	Target	Target
Kinerja	dan Awal Periode Renstra)	2026	2027	2028	2029
Nilai Implementasi Program Budaya Kerja Lingkup	70,00	-	1	1	-

Berdasarkan informasi pada tabel diatas, ISK.19 "Nilai Implementasi Program Budaya Kerja" pada Tahun 2025 yang merupakan tahun berjalan dan awal periode Renstra terdapat target yang ditetapkan Nilai sebesar 70,00. Adapun informasi dapat dilihat pada Tabel 51. berikut ini

Tabel 51
Hasil Capaian ISK.19 "Nilai Implementasi Program Budaya Kerja"
Triwulan I Tahun 2025

						u = 0					
Indikator Sasaran	TW I	2025	TW I	2026	TW I	2027	TW I	2028	TW I	2029	Persen
Kinerja	Т	С	Т	C	Т	С	Т	С	Т	C	
Nilai Implementasi Program Budaya Kerja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Berdasarkan tabel diatas belum terdapat target maupun capaian kinerja pada Triwulan I Tahun 2025. Hal tersebut dikarenakan periode pengukuran kinerja pada ISK.19 dilakukan pada akhir tahun. Apabila dibandingkan dengan capaian pada triwulan tahun-tahun sebelumnya, belum dapat dibandingkan dikarenakan tahun 2025 merupakan awal periode Renstra, sehingga belum terdapat target maupun capaian yang dapat dibandingkan.

Indikator keberhasilan ISK tersebut diukur dari tercapainya target pada komponen penilaian 1. Tim Satker; 2. Hasilkan Inovasi Unit Kerja (HIU); 3. Lima Menit Sebelum Jadwal; 4. Ringkas, Rapi, Resik, Rawat, Rajin (5R); 5. Upayakan Data Terkini (UPDATE); 6. Organisasikan Rapat, Catat, Aksi, dan Arsipkan (ORCA); 7. Tegakkan Aturan dengan Akuntabel dan Transparan (TAAT); 8. Belanjakan Anggaran secara Realistis, Akuntabel, dan Amanah (BARRAKUDA); 9. ASN PSDKP Produktif Kerja (APIK); 10. Menyelesaikan Tugas dengan Tepat (MANTAP); 11. Hargai, Motivasi, dan Inisiatif (HARMONIS); dan 12. Gelorakan Gerakan Hemat Energi (Go Green).

Alokasi anggaran yang digunakan untuk mendukung tercapainya Sasaran Kinerja 7 "Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Lingkup Ditjen PSDKP" dialokasikan pada Kode Mata Anggaran Kegiatan 2355 dengan rincian masing-masing ISK dapat dilihat pada Tabel 52. sebagai berikut.

Tabel 52 Realisasi Anggaran Sasaran Kerja 8 "Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif, Lincah dan Akuntabel Dalam Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan" Pada Stasiun PSDKP Tahuna

Kode	Kode MAX	Sasaran Kerja / Indikator Kinerja / Komponen	Alokasi Anggaran Tahun 2025 (Rp)	Pagu Real (Rp)	Realisasi TW I Tahun 2025 (Rp)	Persentase (%)
SK.7	2355	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup Ditjen PSDKP	Rp. 6.789.908.000	Rp. 4.985.828.000	Rp.1.543.919.204	30,97%
ISK.15		Indeks Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan	Rp. 143.235.000	Rp. ,-	Rp. ,-	-

Kode	Kode MAX	Sasaran Kerja / Indikator Kinerja / Komponen	Alokasi Anggaran Tahun 2025 (Rp)	Pagu Real (Rp)	Realisasi TW I Tahun 2025 (Rp)	Persentase (%)
		Publik Lingkup Stasiun PSDKP Tahuna				
ISK.16	2355.EBD. 961	Nilai Minimal Yang Dipersyaratkan Untuk Membangun Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) Stasiun PSDKP Tahuna				
ISK.18		Inovasi Pelayanan Publik Yang Diterapkan Pada Unit Kerja Stasiun PSDKP Tahuna				
ISK.13		Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan Berbasis Manajemen Risiko Lingkup PSDKP Tahuna				
ISK.14	2355.EBA. 963 2355.EBA. 958 2355.CAN. 001 2355.EBD. 955 2355.EBA.	Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup Stasiun				
ISK.10	994 2355.EBD. 952	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup Stasiun PSDKP Tahuna	Rp. 5.884.191.000	Rp. 4.809.430.000	Rp. 1.478.687.724	30,75%
ISK.9		Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKA) Stasiun PSDKP Tahuna				

Kode	Kode MAX	Sasaran Kerja / Indikator Kinerja / Komponen	Alokasi Anggaran Tahun 2025 (Rp)	Pagu Real (Rp)	Realisasi TW I Tahun 2025 (Rp)	Persentase (%)
ISK.17	2355.EBD. 974	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Lingkup Ditjen PSDKP	Rp. 43.050.000	Rp. ,-	Rp. ,-	-
ISK.11	2355.EBC. 954	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Stasiun PSDKP Tahuna	Rp. 69.300.000	Rp. 6.318.000	Rp. ,-	-
ISK.12	2355.EBD. 953	Penilaian Mandiri SAKIP Stasiun PSDKP Tahuna	Rp. 55.650.000	Rp. ,-	Rp. ,-	-
ISK.19	2355.EBA. 960	Nilai Implementasi Program Budaya Kerja	Rp. 53.088.000	Rp. ,-	Rp. ,-	-

Penjelasan warna: Sasaran Kerja Indikator Sasaran Kinerja

Pada tabel diatas dapat dilihat, alokasi anggaran SK.8 Tahun 2025 sebesar Rp. 6.789.908.000,-. dan pagu real sebesar Rp. 4.985.828.000. Berdasarkan perhitungan sampai akhir Triwulan I Tahun 2025 telah terealisasi sebesar Rp. 1.543.919.204,- (30,97%). Dengan rincian untuk ISK.15, ISK.16, dan ISK.18 yang tergabung dalam satu kode mata anggaran 2355.EBD.961 dengan alokasi anggaran Rp. 143.235.000 dengan pagu real sebesar Rp. 9.146.000 realisasi sebesar Rp., - persentase sebesar 0%. ISK.9, ISK.10, ISK.13, dan ISK.14 yang tergabung dalam 6 (Enam) mata anggaran dengan alokasi anggaran Rp. 5.884.191.000 dengan pagu real sebesar Rp. 4.809.430.000 dengan realisasi sebesar Rp. 1.478.687.724,- persentase sebesar 30,75%. ISK.17 terdapat realisasi anggaran sebesar Rp., - dari alokasi anggaran sebesar Rp. 43.050.000 dengan persentase -%. ISK.11 terdapat realisasi anggaran sebesar Rp.,- dan pagu real sebesar Rp. 6.318.000 dari alokasi anggaran sebesar Rp. 69.300.000 dengan persentase -% ISK.12 terdapat realisasi anggaran sebesar Rp., - dari alokasi anggaran Rp. 55.650.000 dan pagu real sebesar Rp. ,- dengan persentase sebesar -%. ISK.19 terdapat realisasi anggaran sebesar Rp., - dari alokasi anggaran Rp. 53.088.000 dan pagu real sebesar Rp., - dengan persentase

sebesar -%

C. Akuntabilitas Sumber Daya Manusia dan Keuangan

Dalam pembentukan UPT Stasiun PSDKP Tahuna melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33 Tahun 2016, jumlah PNS UPT Stasiun Pengawasan SDKP Tahuna berjumlah 8 (delapan) orang dan di Satwas SDKP Talaud berjumlah 1 (satu) orang. Sampai dengan awal tahun 2025, UPT Stasiun Pengawasan SDKP Tahuna memiliki 31 (tiga puluh satu) ASN terdiri dari 27 (Dua Puluh Tujuh) PNS, 4 (Empat) PPPK di Stasiun Pengawasan SDKP Tahuna, 3 (tiga) ASN di Satwas SDKP Talaud dan 11 (sebelas) ASN sebagai awak kapal pengawas perikanan. Selanjutnya Stasiun Pengawasan SDKP Tahuna memiliki 17 (Tujuh Belas) Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) dan Penyedia Jasa Lainnya Orang Perorangan (PJLP). Daftar Urut Kepangkatan (DUK) pegawai Stasiun Pengawasan SDKP Tahuna telah terekam dalam aplikasi e-Pegawai KKP.

Informasi terkait komposisi, golongan, pangkat, pendidikan dan kualifikasi, lokasi penempatan ASN dan PPNPN dapat dilihat pada Tabel 53 dan 54 dibawah ini.

Tabel 53 Komposisi Golongan dan Kualifikasi Pendidikan ASN Stasiun PSDKP Tahuna

		Golongan					n				
No	Jabatan	1	П	Ш	Jumlah	S2	S1/ DIV	DIII	SMA / SMK / SUPM	SMP	Jumlah
1	Kepala Stasiun	-	-	1	1	1	-	-	-	-	1
2	Ketua Tim Kerja	-	-	5	5	1	3	1	1	1	5
3	Pejabat Fungsional (Pengawas Perikanan)	-	5	1	6	1	1	3	2	1	6
4	Pelaksana	-	9	10	19	ı	3	8	8	-	19

Tabel 54
Daftar PPNPN dan PJLP di UPT Stasiun PSDKP Tahuna

No	Penempatan Kerja	Jumlah PPNPN/PJLP
1	Stasiun PSDKP Tahuna	14
2	Satwas SDKP Talaud	3
	Jumlah	17

Nilai pagu anggaran Tahun 2025 yang telah dianggarkan untuk lingkup Stasiun Pengawasan SDKP Tahuna sebesar Rp. 14.293.185.000.- dengan pagu real sebesar Rp. 6.841.880.000,- dimana sampai dengan akhir Triwulan I Tahun 2025, terdapat realisasi anggaran senilai Rp. 1.786.887.816,- dari sisa pagu real dengan persentase 26,12%. Adapun rincian realisasi untuk Triwulan I Tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel 55. berikut ini.

Tabel 55 Rincian Realisasi Triwulan I Tahun 2024 Stasiun PSDKP Tahuna

Milician Realisasi inwalan Tanan 2024 Stasian TSDN Tanana						
Kode	Kegiatan/Output	Pagu (Rp)	Pagu Real (Rp)	Realisasi (Rp.)	Persen	
2350	Pemantauan, Operasi Armada dan Infrastruktur Pengawasan	6.930.075.000,-	1.794.126.000,-	223.797.900,-	12,47%	
2351	Penanganan Pelanggaran Bidang Kelautan dan Perikanan	196.455.000,-	31.606.000,-	18.120.712,-	57,33%	
2352	Pemantauan dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	376.747.000,-	30.320.000,-	1.050.000,-	3,46%	
2355	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen PSDKP	6.789.908.000,-	4.985.828.000,-	1.543.919.204,-	30,97%	
Total Anggaran dan Realisasi		14.293.185.000,-	6.841.880.000,-	1.786.887.816,-	26,12%	

Pada kegiatan Pemantauan, Operasi Armada dan Infrastruktur Pengawasan telah tercapai realisasi sebesar Rp. 223.797.900,- dengan persentase 12,47% dari alokasi anggaran (real) sebesar Rp. 1.794.126.000,-. Pada kegiatan Penanganan Pelanggaran Bidang Kelautan dan Perikanan telah tercapai realisasi sebesar Rp. 18.120.712,- dengan persentase 57,33% dari alokasi anggaran (real) sebesar Rp. 31.606.000,-. Dari kegiatan Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan telah tercapai realisasi

sebesar Rp. 1.050.000,- dengan persentase 3,46% dari alokasi anggaran (real) sebesar Rp. 30.320.000,-. Dari kegiatan Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen PSDKP telah tercapai realisasi sebesar Rp. 1.543.919.204,- dengan persentase 30,97% dari alokasi anggaran (real) sebesar Rp. 4.985.828.000,-. Serapan anggaran pada Kode 2350, 2351, 2352, dan 2355 termasuk baik karena sesuai dengan target serapan Triwulan I Tahun 2025.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

- a. Pelaksanaan tugas dan fungsi Stasiun PSDKP Tahuna berlandaskan pada tujuan, sasaran dan program kerja yang telag ditetapkan di dalam Renstra KKP, Renstra Ditjen PSDKP, dan kontrak kinerja antara Direktur Jenderal PSDKP (sebagai pemberi amanah) dengan Kepala Stasiun PSDKP Tahuna (sebagai penerima amanah) sebagai acuan dalam pencapaian kinerja yang telah ditetapkan.
- b. Sejalan dengan perkembangan kebijakan dan reformasi birokrasi di KKP, Stasiun PSDKP telah menetapkan 19 (Sembilan Belas) Indikator Sasaran Kinerja (ISK), dimana Stasiun PSDKP Tahuna telah mengidentifikasikan menjadi 8 (Delapan) IKU dan 11 (Sebelas) IKM yang melekat pada 8 (Delapan) Sasaran Kegiatan pada Penetapan Kinerja Tahun Anggaran 2025.
- c. Laporan Kinerja (LKj) Triwulan I Tahun 2025 Stasiun PSDKP Tahuna memberikan gambaran terhadap capaian kinerja sepanjang Triwulan I Tahun 2025, sebagai bahan evaluasi dan rencana tindak lanjut dalam rangka pencapaian kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2025.
- d. Stasiun PSDKP Tahuna mendapatkan nilai kinerja pada Triwulan I Tahun 2025 sebesar 100,83 dengan predikat "Baik".

B. Rekomendasi

Berdasarkan hasil evaluasi atas capaian kinerja pada Triwulan IV Tahun 2024 dan evaluasi capaian kinerja pada Triwulan I Tahun 2025, sebagai upaya peningkatan kinerja berikutnya terdapat hal yang perlu diperhatikan dan ditindaklanjuti. Rekomendasi dan tindak lanjut dapat dilihat pada Tabel 56. sebagai berikut:

Tabel 56 Tindak Lanjut Laporan Kinerja Triwulan IV Tahun 2024

No	Hal yang Harus Diperbaiki	Tindak Lanjut	Hambatan
1.	Terdapat Indikator Kinerja Utama (IKU) yang potensi tercapainya kecil dikarenakan Indikator Kinerja (IKU) tersebut bersifat Kasuistis, yaitu pada Iku: 1. Indeks Pengenaan Sanksi Administratif Bidang Kelautan dan Perikanan 2. Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Melakukan koordinasi dengan POA terkait anggaran patroli kapal pengawas	Kurangnya dukungan anggaran dalam pelaksanaan patroli kapal pengawas
2.	Belum terlaksananya publikasi capaian kinerja setiap periode penilaian dengan tepat waktu	Melaksanakan publikasi capaian kinerja dengan tepat waktu sesuai dengan waktu pengukuran capaian kinerja	Kurangnya koordinasi antara tim monev kinerja dan bagian humas terkait dengan publikasi capaian kinerja pada setiap penilaiannya

Tabel 56 Rekomendasi Penutup dan Rencana Tindak Lanjut Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2025

No	0	Hal yang Harus Diperbaiki	Tindak Lanjut	Hambatan
1.		Jumlah kegiatan pengawasan yang masih kurang baik dari bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan maupun bidang Pengawasan Sumber Daya	Melakukan rapat monev terkait dengan kegiatan pengawasan yang akan dilakukan serta membuat jadwal pengawasan di setiap	Kurangnya dukungan anggaran dalam pelaksanaan kegiatan
		Perikanan	bulan pada Triwulan berjalan	pengawasan

LAMPIRAN